

NEWSLETTER



HUBDAT

Berpikir Jernih Membangun Transportasi Darat

Edisi
TRIWULAN

JUNI 2026

Transit Oriented Development
dalam Konteks Perkotaan Indonesia:

Integrasi Transportasi Massal sebagai Strategi Reformasi Tata Kota

oleh

Ir. Andi Putra Jaya, S.SiT., M.Sc., IPM., ASEAN Eng., QRMP

Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda, Kementerian Perhubungan



**RAYAKAN HARI KARTINI
KEMENHUB DORONG
PEREMPUAN JADI
AGEN PERUBAHAN**

**KEMENHUB DAN UNICEF
PERKUAT EDUKASI
KESELAMATAN JALAN**

**DITJEN HUBDAT PERKUAT
PELAYANAN PUBLIK
MELALUI PENCANANGAN
PEMBANGUNAN
ZONA INTEGRITAS**

Dr. Drs. Aan Suhanan, M.Si
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT



Keselamatan Masyarakat adalah Prioritas Utama

*Bukan hanya soal aturan,
keselamatan berlalu lintas tetapi juga soal
budaya saling menghargai, tertib, dan peduli
terhadap keselamatan diri sendiri
maupun orang lain*



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

info **HUBDAT**

Berpikir Jernih Membangun Transportasi Darat



MAJALAH INFOHUBDAT

PENANGGUNG JAWAB
Ernita Titis Dewi

REDAKTUR PELAKSANA
Mogot Bukara

REDAKTUR UTAMA
Herman Wibowo
Sari Hayu Hutami
Didik Prasetyo

REDAKTUR
Alvia Lilian
Indriastuti Septiyani

LAYOUT DAN FOTOGRAFI
M. Aulia Dharma
Bayu Adi Saputro
Ahmad Alfian Al Qodhrie
Bambang Widiyanto
Fachry Dwinugraha
Rinjani Pangestu

SEKRETARIAT
Bejo Sri Wahono
Dinda Lidya R
Yusnita Yuliana
Ely Rusnita
Yudha Kurniawan
Amalia Nabatan
Kurniadi Zaini
Aprina Ramadhani
Rifai Dyan A
M. Farid Ardiansyah

Achmad Maulana
Rosmala D
Dwika Reza Saputra
Nurfadilah Sinta N
Ade Yunita
Rina Noviana
Virsa Rosadya
Septiani
Vinisella

DITERBITKAN OLEH:
Humas Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

ALAMAT:
Gedung Karya Lantai 12
Jl. Medan Merdeka Barat No. 8
Jakarta Pusat 10110
TELP / FAX:
(021) 3506141
EMAIL:
humas.hubdat@gmail.com
WEBSITE:
www.hubdat.kemenhub.go.id

SUDUT REDAKSI

Pembaca Newsletter infoHUBDAT yang kami hormati,

Pada pertengahan tahun 2026 ini, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat terus melakukan evaluasi dan penguatan kebijakan guna memastikan mobilitas masyarakat dapat terselenggara secara selamat, aman, tertib, dan lancar. Upaya peningkatan kualitas layanan transportasi darat senantiasa menjadi prioritas dalam menjawab dinamika kebutuhan masyarakat.

Pada edisi kali ini, Newsletter infoHUBDAT kembali hadir dengan beragam sajian informasi aktual dan inspiratif. Melalui rubrik Catatan Darat, Lensa Hubdat, serta rubrik lainnya, kami menghadirkan rangkaian kegiatan, capaian kinerja, serta inovasi yang dilakukan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Rubrik Info Sarana yang banyak membahas mengenai keselamatan angkutan orang pada masa libur sekolah, serta mengenai Zero Kendaraan ODOL. Lalu Info Angkutan membahas peluncuran aplikasi SUMBA dan pengoperasian Trans Batam.

Selain itu, kami juga merangkum berbagai aktivitas dan program strategis yang telah dilaksanakan sepanjang periode ini. Sebagai penutup, kami hadirkan kaleidoskop peristiwa dalam sajian visual yang merekam momen-momen penting melalui bidikan lensa.

Semoga informasi yang kami sajikan dapat memberikan manfaat, memperluas wawasan, serta menjadi referensi bagi seluruh pembaca.

Selamat membaca.



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NAIK DAMRI KSPN

Liburan jadi semakin berwarna!

UJUNG KULON DAN CARITA

Jadwal Perjalanan DAMRI KSPN Banten

St. Rangkasbitung – Ujung Kulon Via Labuan – Panimbang – Tanjung Lesung – Sumur		Term. Poris – Pantai Pandan Carita Via Serang – Cilegon – Anyer	
Berangkat (WIB)	Pulang (WIB)	Berangkat (WIB)	Pulang (WIB)
07.30	06.00	07.00	07.00
11.00	13.00	13.00	13.00

Tarif
Rp 50.000



DIRJEN MENYAPA

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pembaca Newsletter infoHUBDAT yang saya banggakan,

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita kembali dipertemukan dalam edisi terbaru Newsletter infoHUBDAT. Media ini bukan sekadar sarana informasi, tetapi juga ruang untuk mempererat silaturahmi, memperkuat sinergi, serta membangun semangat kebersamaan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kita.

Periode April-Juni 2026 menjadi momentum yang penuh dinamika bagi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang terus memperkuat upaya peningkatan kualitas layanan transportasi melalui pengembangan sarana dan prasarana transportasi darat, penguatan aspek keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, peningkatan pengawasan operasional angkutan, serta optimalisasi pelayanan kepada masyarakat. Berbagai kegiatan koordinasi, sosialisasi, monitoring, evaluasi, dan kolaborasi dengan pemerintah daerah, pemangku kepentingan, serta mitra kerja juga terus dilakukan guna memastikan setiap program berjalan secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Selain itu, keberhasilan penyelenggaraan berbagai agenda transportasi selama periode ini merupakan hasil kerja keras, dedikasi, dan sinergi seluruh insan perhubungan darat di pusat maupun daerah. Tantangan yang dihadapi menjadi motivasi bagi kita untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik sejalan dengan arah pembangunan transportasi nasional.

Melalui Newsletter infoHUBDAT ini, kami berharap masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan dapat memperoleh informasi yang komprehensif mengenai berbagai capaian, program, serta kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat selama periode April-Juni 2026.

Mari kita terus memperkuat komitmen pelayanan, menjaga profesionalisme, dan menghadirkan transportasi darat yang semakin berkeselamatan dan berkelanjutan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan, kekuatan, dan perlindungan kepada kita semua dalam menjalankan amanah ini. Terima kasih atas dedikasi dan kerja keras yang telah diberikan.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Dr. Drs. Aan Suhanan, M.Si
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT



DAFTAR ISI

Edisi Triwulan

Vol. 02/2026

- 02 Masthead
- 04 Editorial
- 05 Daftar Isi

info KHUSUS

- 06 **RAYAKAN HARI KARTINI**
KEMENHUB DORONG
PEREMPUAN JADI AGEN
PERUBAHAN

info ANGKUTAN

- 10 **DIRJEN HUBDAT TEMUKAN**
BUS ALS YANG TERLIBAT
KECELAKAAN TIDAK BERIZIN
- 12 **KEMENHUB DORONG**
TRANSFORMASI MOBILITAS ASEAN
YANG LEBIH BERSIH, CERDAS, DAN
TERHUBUNG
- 14 **MUSYAWARAH NASIONAL III**
APTRINDO, DITJEN HUBDAT
TEKANKAN KEPATUHAN DAN
KOLABORASI PENGUSAHA TRUK
- 16 **OPTIMALKAN LAYANAN**
TRANS BATAM, KEMENHUB
APRESIASI PEMKOT BATAM
- 18 **OPTIMALKAN ANGKUTAN**
BARANG, KEMENHUB APRESIASI
OPERATOR YANG TERTIB
ATURAN, SEKALIGUS TERTIBKAN
KENDARAAN MELANGGAR
- 19 **WUJUDKAN SISTEM**
TRANSPORTASI PERKOTAAN
TERINTEGRASI, KEMENHUB
BAHAS PEMBANGUNAN BRT BBMA
- 20 **KEMENHUB CATAT TINGKAT**
KEPATUHAN KENDARAAN
ANGKUTAN BARANG CAPAI 75%
- 20 **DUKUNG ZERO ODOL 2027,**
KEMENHUB BANGUN APLIKASI
SUMBA
- 21 **PASTIKAN KELAIKAN**
KENDARAAN, KEMENHUB
LAKUKAN PENGAWASAN 1,7 JUTA
PERJALANAN BUS PERIODE
JANUARI-JUNI 2026
- 22 **SERIOUS TANGANI KENDARAAN**
LEBIH DIMENSI DAN LEBIH
MUATAN, KEMENHUB SUSUN
QUICK WIN

info LALU LINTAS

- 24 **KEMENHUB UJI COBA TERBATAS**
ETLE UNTUK PENANGANAN KENDARAAN
LEBIH DIMENSI DAN LEBIH MUATAN

info PRASARANA

- 28 **SAKSI TEGAS PO YANG TIDAK**
MASUK TERMINAL

info SARANA

- 30 **KEMENHUB DAN UNICEF**
PERKUAT EDUKASI KESELAMATAN
JALAN
- 32 **PERKUAT KESELAMATAN LOGISTIK,**
KEMENHUB GELAR BIMTEK *SAFETY*
DRIVING PENGEMUDI ANGKUTAN
BARANG
- 34 **KEMENHUB TEGASKAN SMK PAU**
JADI INSTRUMEN PENTING
WUJUDKAN KESELAMATAN
TRANSPORTASI JALAN
- 36 **RAMPCHECK BUS**
DEMI KESELAMATAN
- 37 **DITJEN HUBDAT PERKUAT**
BUDAYA BERSEPEDA AMAN
MELALUI KLIC FEST 2026
- 38 **LIBUR PANJANG, KEMENHUB**
LAKUKAN RAMPCHECK UTAMAKAN
KESELAMATAN LALU LINTAS
- 39 **KEMENHUB PERIKSA KELAIKAN**
LEBIH DARI 900 RIBU KALI
PERJALANAN BUS
- 40 **DITJEN HUBDAT PANGGIL**
GREEN SM IMBAS KECELAKAAN
KRL CIKARANG DAN KA ARGO
BROMO ANGGREK
- 41 **KEMENHUB PERKUAT IMPLEMENTASI**
KENDARAAN *ZERO ODOL 2027*

info SPASDP

- 45 **EVALUASI ANGKUTAN LEBARAN**
DI BALI

info SEKRETARIAT

- 46 **DITJEN HUBDAT PERKUAT**
PELAYANAN PUBLIK MELALUI
PENCANANGAN PEMBANGUNAN
ZONA INTEGRITAS

catatan DARAT

- 48 **TRANSIT ORIENTED**
DEVELOPMENT DALAM KONTEKS
PERKOTAAN INDONESIA
- 52 **DI BALIK ROMPI ORANYE**
- 53 **JALAN YANG MENGAJARKAN**
KEPEDULIAN
- 54 **LEBIH DARI SEKEDAR**
PERJALANAN

lensa HUBDAT

- 58 **JEJAK DI SETIAP PERJALANAN**

RAYAKAN HARI KARTINI

Kemenhub Dorong Perempuan Jadi Agen Perubahan

Mewujudkan keselamatan berlalu lintas, perempuan diharapkan terus mengambil peran aktif dalam membangun budaya tertib berlalu lintas, demi menekan angka kecelakaan dan melindungi masa depan generasi bangsa.

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan menyelenggarakan kegiatan spesial Hari Kartini bertajuk “*Glow with Safety 2026*”. Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong peran perempuan sebagai agen perubahan dalam mewujudkan budaya keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.

Dalam sambutannya, Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan Suhanan menilai perempuan memiliki peran penting dalam menanamkan nilai-nilai dan budaya keselamatan kepada anak-anak. Menurutnya semakin tinggi kesadaran dan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas semakin terlihat kualitas peradaban suatu bangsa.

“Keselamatan berlalu lintas bukan hanya soal aturan tapi juga soal budaya saling menghargai, tertib, dan peduli keselamatan diri sendiri maupun orang lain. Jadi budaya itu mencerminkan peradaban suatu bangsa, orang yang beradab pasti memahami aturan demi keselamatan,” kata Aan saat membuka kegiatan *Kartini Day “Glow with Safety 2026”* di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta, Selasa (21/4).

"Peradaban bangsa harus dimulai. Jadikanlah mereka ibu-ibu yang cakap, cerdas, dan baik. Maka mereka akan menyebarkan peradaban di antara bangsanya."

R. A. Kartini



Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan Suhanan menjelaskan masalah keselamatan lalu lintas di jalan masih menjadi tantangan karena data Korlantas Polri menunjukkan adanya kenaikan jumlah kejadian kecelakaan sejak 2021 hingga 2025, pada 2025 sendiri angkanya mencapai 158.508 kejadian. Kecelakaan tersebut tidak hanya menimbulkan korban jiwa tetapi juga berdampak pada potensi penurunan kesejahteraan keluarga akibat kepala keluarga menjadi korban kecelakaan lalu lintas.

"Di Indonesia setiap satu jam, ada dua sampai tiga orang meninggal akibat kecelakaan lalu lintas, dampaknya tidak hanya pada korban tapi juga keluarga yang ditinggalkan. Ini yang harus kita sadari dan pahami bersama kalau keselamatan lalu lintas di jalan sangat menentukan masa depan keluarga," jelasnya.

Kemudian, masih dari sumber data yang sama memperlihatkan pada 2025 kelompok usia muda menjadi yang paling rentan, dengan 52% korban berusia 15-24 tahun. Selain itu, sepeda motor masih mendominasi kecelakaan dengan kontribusi lebih dari 76% dari total kejadian.

"Kalau generasi mudanya dapat menjadi korban kecelakaan, tentu ini akan berdampak pada masa depan bangsa, di sini lah ibu atau perempuan bisa berperan sebagai pendidik pertama yang menanamkan nilai disiplin, empati, dan kepatuhan terhadap aturan sejak dini. Peran ibu sangat fundamental dalam membentuk karakter anak, termasuk menanamkan budaya tertib berlalu lintas," ucapnya.

Selain itu, lanjutnya, perempuan juga dapat berperan sebagai pengawas mobilitas sehari-hari serta memberi contoh perilaku aman di jalan. Aan menambahkan, perempuan juga dianggap memiliki kekuatan sebagai agen perubahan di lingkungan sosial untuk menyebarkan edukasi keselamatan secara luas kepada masyarakat.

"Ibu-ibu memiliki jaringan sosial yang kuat yang bisa dimanfaatkan untuk menyampaikan edukasi keselamatan kepada masyarakat. Perempuan bukan hanya bagian dari korban tapi juga bagian dari solusi dalam menciptakan keselamatan di jalan," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan, Yusuf Nugroho turut menegaskan kegiatan pada Hari Kartini ini dapat menjadi bagian dari upaya berkelanjutan dalam memperkuat peran perempuan di sektor transportasi dalam menciptakan keselamatan berlalu lintas.

"Perempuan bukan hanya menjadi pengguna jalan, tetapi juga memiliki peran penting dalam membentuk budaya keselamatan. Karena itu, pemberdayaan perempuan sebagai agen perubahan menjadi sangat krusial dalam menekan angka kecelakaan lalu lintas," ujarnya.

Melalui momentum peringatan Hari Kartini ini, perempuan diharapkan terus mengambil peran aktif dalam membangun budaya tertib berlalu lintas, demi menekan angka kecelakaan dan melindungi masa depan generasi bangsa.





Dirjen Hubdat Temukan Bus ALS Yang Terlibat Kecelakaan Tidak Berizin

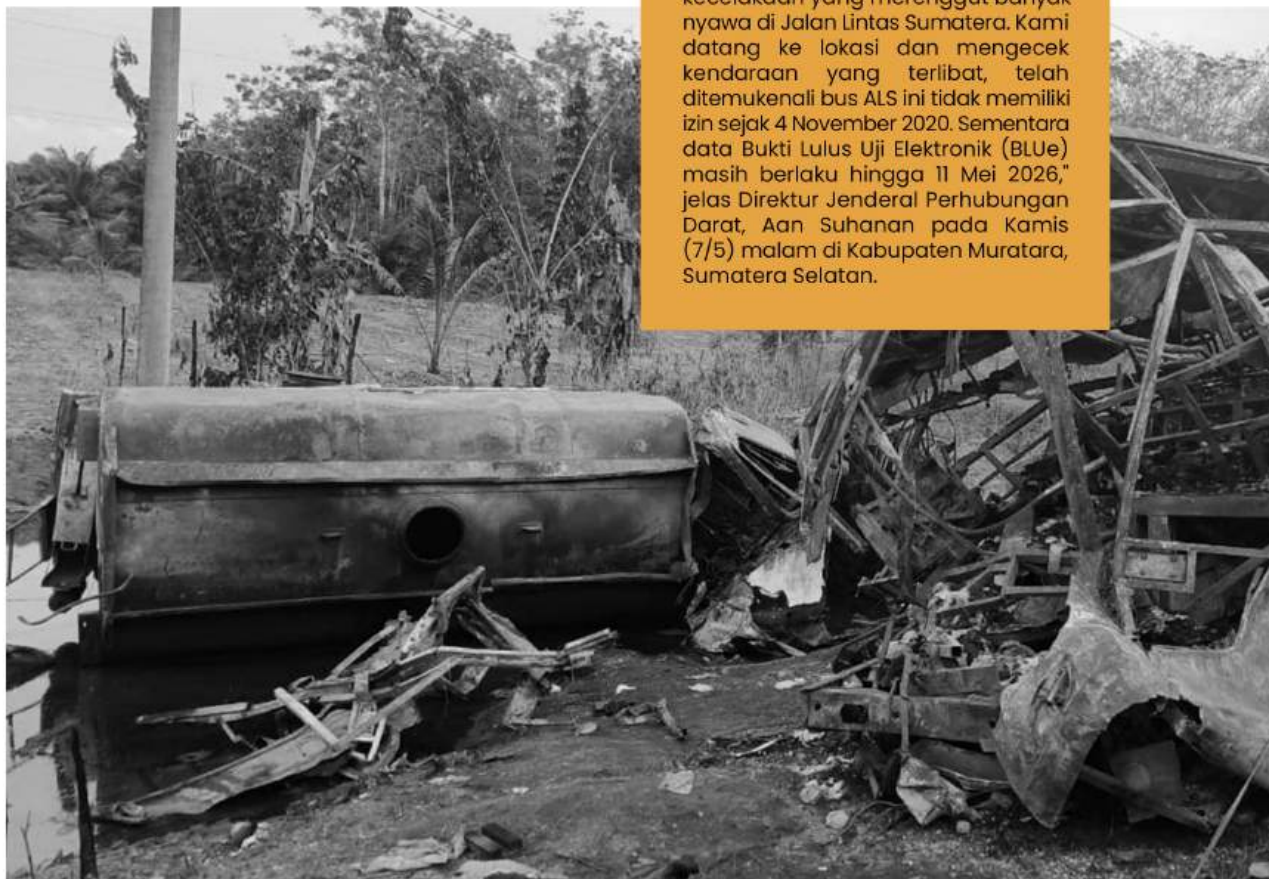
Kecelakaan yang telah melibatkan Bus ALS di Kabupaten Muratara mengungkap sejumlah pelanggaran serius.

Menindaklanjuti insiden kecelakaan yang melibatkan Bus Antar Lintas Sumatera (ALS) bernomor polisi BK 7778 DL (yang ditemukan di lapangan) dan truk tangki bernomor polisi BG 8196 QB pada Rabu (6/5) di Jalan Lintas Sumatera Simpang Danau Kec. Karang Jaya Kab. Muratara, Sumatera Selatan, Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan Suhanan meninjau langsung lokasi kejadian perkara dan mengecek kendaraan yang terlibat kecelakaan.



Peristiwa yang mengakibatkan 16 korban jiwa ini menjadi pengingat pentingnya kepatuhan terhadap regulasi transportasi demi menjamin keselamatan perjalanan dan juga mencegah terulangnya kecelakaan serupa.

"Kami turut berduka cita atas kejadian kecelakaan yang merenggut banyak nyawa di Jalan Lintas Sumatera. Kami datang ke lokasi dan mengecek kendaraan yang terlibat, telah ditemukan bus ALS ini tidak memiliki izin sejak 4 November 2020. Sementara data Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe) masih berlaku hingga 11 Mei 2026," jelas Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan Suhanan pada Kamis (7/5) malam di Kabupaten Muratara, Sumatera Selatan.



la menuturkan bus ALS tersebut dapat dikategorikan melakukan pelanggaran berat sesuai dengan yang tertuang pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek, pasal 102 yakni memalsukan dokumen perjalanan yang sah, mengoperasikan kendaraan yang telah habis masa berlaku izin penyelenggaraannya, melakukan kelalaian pengoperasian kendaraan sehingga menimbulkan kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa. Namun semua temuan lapangan ini akan didalami dengan melakukan audit inspeksi terhadap perusahaan.



Temuan Pelanggaran dan Tindak Lanjut Investigasi Kecelakaan Bus ALS

Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan Suhanan menyebut pada saat investigasi di lapangan petugas menemukan adanya perbedaan nomor rangka pada kendaraan, sehingga terindikasi terjadi praktik pemalsuan nomor polisi kendaraan pada bus ALS.

"Berdasarkan pelanggaran yang dilakukan, tentu saja berpotensi dapat dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan izin enam hingga 12 bulan dan bisa juga dikenakan pencabutan izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek. Terkait pemberian sanksi akan kami telusuri dulu lebih lanjut," ungkapnya.

Sebelum terjadinya kecelakaan, bus ALS melintas di Terminal Tipe A Batay (Lahat) dengan tujuan Medan dengan *manifest* 10 penumpang. Selanjutnya pada Terminal Lubuklinggau tercatat kendaraan bus meninggalkan terminal pada pukul 10.00 WIB dengan total *manifest* 18 orang yang terdiri dari 14 penumpang dan 4 *crew*.

Dari kejadian ini mengakibatkan adanya korban jiwa sebanyak 16 orang yang terdiri dari 11 penumpang bus, 3 *crew* bus, dan 2 *crew* truk tangki. Korban luka-luka sebanyak 4 orang yang terdiri dari 3 penumpang bus dan 1 *crew* bus.

Di hari yang sama, Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan Suhanan juga berkesempatan untuk mengunjungi para korban kecelakaan di Rumah Sakit Umum Daerah Rupit Muratara bersama Dirgakkum Korlantas Polri Brigjen Pol Faizal dan Direktur Operasional PT Jasa Raharja Ariyandi untuk memberikan penguatan dan santunan kepada para korban.

"Adapun terkait dengan penyebab kecelakaan, Ditjen Hubdat menunggu hasil investigasi dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) dan penyelidikan pihak Polri," pungkasnya.

Kemenhub Dorong Transformasi Mobilitas ASEAN yang Lebih Bersih, Cerdas, dan Terhubung

Komitmen Kementerian Perhubungan dalam mendorong transformasi mobilitas ASEAN diwujudkan melalui pengembangan transportasi publik yang bersih, cerdas, terintegrasi, dan berkelanjutan, termasuk melalui proyek BRT, integrasi antarmoda, serta kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.

Kementerian Perhubungan telah berkomitmen dalam mendorong pengembangan transportasi publik yang bersih, cerdas, terintegrasi, dan berkelanjutan guna untuk mendukung mobilitas kawasan ASEAN. Komitmen tersebut telah disampaikan Direktur Angkutan Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Muiz Thohir saat menjadi *keynote speaker* dalam *Busworld Southeast Asia Conference 2026* di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Rabu (20/5), yang mengangkat tema *"Driving the Future of ASEAN Mobility: Clean, Smart, and Connected Buses"*.

"Bagi banyak kota di kawasan ASEAN, keberhasilan transformasi transportasi berkelanjutan sangat ditentukan oleh kemampuan menghadirkan sistem layanan bus yang andal, efisien, terjangkau, dan inklusif bagi masyarakat. Untuk itu kami berkomitmen terus mendorong pengembangan sistem transportasi publik yang berorientasi pelayanan kepada masyarakat," jelas Direktur Angkutan Jalan, Muiz Thohir.

Direktur Angkutan Jalan, Muiz Thohir mengatakan, layanan angkutan bus yang dapat menjadi moda transportasi yang strategis untuk mendukung konektivitas harian masyarakat dan layanan bus juga telah memiliki kemampuan pengembangan tinggi dalam mendukung sistem transportasi perkotaan maupun regional. Oleh karena itu, saat ini Kementerian Perhubungan terus melakukan upaya dalam memperkuat sistem transportasi publik nasional, salah satunya dalam mengembangkan

proyek *Bus Rapid Transit (BRT)* bersama *World Bank* di wilayah Cekungan Bandung (BRT Bandung Basin Metropolitan Area) dan BRT di wilayah Sumatera Utara yang mencakup Medan, Binjai, Deli Serdang (Mebidang).

"Kami berupaya mengembangkan sistem dan layanan transportasi publik melalui pengembangan angkutan massal perkotaan, sistem BRT, integrasi antarmoda. Saat ini kami bekerja sama dengan *World Bank* untuk mengembangkan *pilot project* BRT Sumatera Utara dan BRT di Bandung dengan *dedicated lane*, halte, termasuk dengan pengembangan ITS untuk mensupport operasional," kata Direktur Angkutan Jalan, Muiz Thohir.

Ia melanjutkan, Kementerian Perhubungan tengah memperluas sinergi dengan pemerintah daerah, pelaku industri, mitra pembangunan, dan operator transportasi. Langkah ini guna mewujudkan transportasi publik yang semakin andal, terintegrasi, dan mampu menjadi pilihan utama masyarakat dalam mendukung mobilitas sehari-hari.

"Jadi konsep yang telah kita kembangkan di BRT Bandung maupun Medan yakni kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat membangun infrastruktur untuk BRT sedangkan dengan penyediaan sarannya, bus termasuk bus listrik menjadi tanggung jawab dari pemerintah daerah, jadi itu bentuk kolaborasi kita dan komitmen kita bersama," ungkapnya.

Ia menambahkan, transformasi mobilitas yang lebih bersih, cerdas, terhubung, dan inklusif dapat direalisasikan melalui kerja sama semua pihak. Direktur Angkutan Jalan, Muiz Thohir menyampaikan, sinergi dan kolaborasi pemerintah dengan *stakeholder* dan masyarakat menjadi kunci utama dalam mewujudkan masa depan mobilitas di ASEAN.

"Apabila kita ingin kota yang lebih bersih, maka perlu sistem transportasi lebih ramah dengan lingkungan, jika ingin mobilitas yang lebih efisien, diperlukan sistem transportasi yang lebih cerdas. Apabila ingin perjalanan semakin terhubung, *seamless*, maka diperlukan konektivitas yang semakin kuat antarmoda dan antarwilayah yang dapat diwujudkan dengan kolaborasi," tutup Direktur Angkutan Jalan, Muiz Thohir.



“

Ditjen Intram Tampilkan Konsep Transportasi Hijau dan Integrasi Multimoda.”

Dalam kesempatan yang sama, Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda turut hadir dalam ajang *Busworld Southeast Asia 2026*, dengan membawa konsep transportasi hijau dan integrasi multimoda sebagai bagian dari upaya mendukung transformasi sistem transportasi nasional yang modern, terintegrasi, dan berkelanjutan. Kehadiran Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda pada pameran ini menjadi wadah dan bukti kolaborasi pemerintah, pelaku industri, operator transportasi, dan masyarakat dalam membangun mobilitas masa depan yang lebih efisien dan rendah emisi.

Pada booth Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda, pengunjung dapat melihat langsung demonstrasi aplikasi Integrasi Hub, informasi terkait *Transit Oriented Development* (TOD), perizinan Badan Usaha Angkutan Multimoda (BUAM), serta berbagai konsep integrasi transportasi antarmoda lainnya yang mendukung konektivitas masyarakat secara lebih mudah dan berkelanjutan. Berbagai inovasi tersebut ditampilkan sebagai bentuk komitmen dari pemerintah dalam mendorong sistem transportasi publik yang terkoneksi dan ramah lingkungan di Indonesia.

Partisipasi dari Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda, dalam *Busworld Southeast Asia 2026* diharapkan dapat memperkuat sinergi lintas sektor pengembangan ekosistem transportasi hijau di Indonesia dan kawasan ASEAN. Selain menjadi ruang edukasi dan diskusi mengenai integrasi transportasi, kehadiran booth ini juga menunjukkan kesiapan Indonesia dalam menghadapi perkembangan industri transportasi masa depan semakin berbasis teknologi, konektivitas, dan keberlanjutan.





Musyawarah Nasional III Aptrindo, Ditjen Hubdat **Tekankan Kepatuhan** dan Kolaborasi Pengusaha Truk

Menegaskan pentingnya modernisasi armada, kepatuhan terhadap regulasi, serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung transformasi logistik nasional dan mewujudkan program Zero Over Dimension Over Loading (ODOL) 2027.

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan menekankan pentingnya kepatuhan dan kolaborasi dari para mitra strategis rantai distribusi dan logistik nasional yakni para pengusaha truk. Hal ini telah disampaikan Direktur Angkutan Jalan Muiz Thohir saat membacakan sambutan Menteri Perhubungan pada kegiatan Musyawarah Nasional III Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) yang digelar di Jakarta, Rabu (20/5).

Ia melanjutkan, hal tersebut juga merupakan langkah menuju program utama pemerintah saat ini yaitu *Zero Over Dimension Over Loading 2027*. Berkaitan dengan itu, pengusaha truk atau angkutan barang memiliki peran strategis sebagai mitra transformasi logistik.

"Melalui forum ini, kita mengingatkan bahwa para pengusaha angkutan barang memiliki peran strategis melalui modernisasi operasional, kepatuhan dan profesionalisme, serta kolaborasi dan integrasi data," paparnya.

Modernisasi perlu dilakukan dengan *Fleet Management System*, *GPS tracking* dan *telematics*, *digital dispatching*, *electronic proof of delivery*, dan investasi teknologi armada. Sementara kepatuhan dan profesionalisme wajib dilakukan melalui kepatuhan dimensi dan muatan, peningkatan standar keselamatan kendaraan, pemenuhan kompetensi pengemudi, dan penguatan tata kelola perusahaan. Untuk integrasi data dapat dilakukan melalui *sharing data* operasional, dukungan *supply chain visibility*, serta integrasi platform logistik digital.

Berdasarkan hasil uji terbatas, sejak 27 Januari 2026 hingga 3 Mei 2026 tercatat 90.960 pelanggaran yang terdeteksi diantaranya sebesar 57% pelanggaran daya angkut dan 43% pelanggaran dokumen.



Sektor angkutan barang melalui darat merupakan tulang punggung utama rantai distribusi dan logistik nasional. Perannya sangat krusial dalam memastikan kelancaran distribusi barang ke seluruh pelosok negeri

Adapun, terdapat sepuluh perusahaan yang tercatat melakukan pelanggaran dengan jumlah yang tinggi di antaranya PT SIL, PT SB, CV GJ, PT ML, PT SA, PT GJE, S, PT BPT, PT SS dan PT MKA.

Ke depan, Kementerian Perhubungan juga akan menggunakan sistem *e-manifest transporter* dengan nama "Sumba" (Surat Muatan Barang). "Teknologi ini menyediakan sistem pendataan dan pemantauan muatan kendaraan secara digital, akurat, dan terintegrasi guna meningkatkan keselamatan, menekan kerusakan infrastruktur dan mendukung penegakan regulasi angkutan barang yang terintegrasi dengan Sistem Pemberitahuan Barang (PAB Darat)," imbuhnya.

Pihaknya berharap setiap langkah yang dilakukan demi mewujudkan *Zero ODOL 2027* dapat berjalan dengan baik dan lancar didukung oleh kolaborasi dan sinergi dari seluruh Kementerian/Lembaga, TNI/Polri, pihak BUMN, BUMS, dan seluruh mitra strategis sektor angkutan barang.



Optimalkan Layanan Trans Batam, Kemenhub Apresiasi Pemkot Batam



SEMOGA TRANS BATAM BISA MENJADI SEBUAH PERCONTOHAN NASIONAL UNTUK MENGURANGI KEMACETAN DAN MENDONGKRAK PEREKONOMIAN.

AAN SUHANAN
Direktur Jenderal
Perhubungan Darat

Penguatan layanan Trans Batam melalui penambahan armada, integrasi antarmoda, dan digitalisasi pelayanan menunjukkan komitmen pemerintah menghadirkan transportasi publik yang modern, efisien, dan berkelanjutan.

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sangat mengapresiasi komitmen Pemerintah Kota Batam dalam mengoptimalkan layanan bus Trans Batam melalui penambahan jumlah armada pada tahun 2026. Hal ini dinilai sebagai langkah strategis dalam menghadirkan transportasi publik yang modern dan terintegrasi untuk mendukung mobilitas masyarakat.

"Pengembangan *Bus Rapid Transit* (BRT) melalui skema *Buy The Service* (BTS) ini adalah langkah strategis untuk mewujudkan mobilitas kota yang tertib, produktif, dan berkelanjutan. Kami melihat penguatan Trans Batam dilakukan konsisten, penambahan armadanya bertahap

sejak 2024 hingga penambahan 19 unit di tahun 2026," ucap Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan Suhanan dalam sambutannya pada kegiatan Peluncuran Pengoperasian Bus Trans Batam Tahun 2026 di Batam, Kepulauan Riau, Selasa (26/5).

Sejak tahun 2024, Pemkot Batam telah menghadirkan 20 unit bus Trans Batam, kemudian menambah armada sebanyak 13 unit di tahun 2025, dan kembali menambah 19 unit bus pada 2026 sehingga total armada BTS yang beroperasi mencapai 52 unit.

"Seluruh armada siap mengoptimalkan untuk pelayanan di lima koridor strategis menuju Batam Centre yakni Sekupang, Tanjung Uncang, Jodoh, Tanjung Piayu, dan Nongsa. Kami juga mengapresiasi penerapan sistem pembayaran non-tunai serta integrasi antarmoda Trans Batam, termasuk konektivitasnya menuju Bandara Hang Nadim," jelas Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan Suhanan.

Lebih lanjut, ia menilai penguatan layanan transportasi publik melalui pengembangan BRT



ini menjadi bagian penting untuk mendukung efisiensi mobilitas masyarakat. Jika tersedia transportasi publik yang efisien, maka dapat mengurangi beban ekonomi masyarakat akibat tingginya biaya transportasi dan kemacetan serta menjadi upaya mencegah krisis energi.

"Saat ini biaya transportasi menghabiskan hingga 30-40% pendapatan masyarakat dan sektor ini juga menyerap 90% dari subsidi BBM senilai Rp300 triliun per tahun. Ketidakseimbangan ini menyebabkan masalah, mulai dari semakin lamanya waktu perjalanan, kerugian akibat kemacetan, polusi udara, hingga kesulitan masyarakat mengakses pendidikan dan pekerjaan," ungkapnya.

Guna mengatasi masalah tersebut, pemerintah terus mengembangkan Angkutan Umum Massal Perkotaan (AUMP) di 20 kota utama sesuai RPJMN 2025-2029. Ia mengatakan, program ini bertujuan untuk mengurangi durasi perjalanan, meningkatkan aksesibilitas, dan mengoptimalkan peran kawasan perkotaan menjadi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.



"Pengembangan AUMP memerlukan perencanaan terintegrasi, kerja sama pendanaan antara pusat dan daerah, serta tata kelola yang kuat. Sehingga diharapkan dapat menciptakan sistem transportasi yang lebih berkelanjutan, adil, dan efisien," kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan Suhanan.

Oleh karena itu, sebagai bentuk dukungan pemerintah pusat terhadap digitalisasi layanan transportasi daerah, maka Direktorat Jenderal Perhubungan Darat juga menyediakan aplikasi Mitra Darat untuk membantu operator meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat secara cepat dan terukur.

Di samping itu, dukungan juga diberikan melalui situs resmi Teman Bus, Aplikasi pengelolaan Operasional BTS, *Executive Dashboard* untuk pemantauan laporan operasional, *Digital Checker App* untuk mengawasi pelaksanaan dalam Standar Pelayanan Minimal oleh operator bus, dan *Checker Web* untuk melihat pencapaian Standar Pelayanan Minimal.

TRANSPORTASI PUBLIK YANG MODERN, TERINTEGRASI, DAN BERKELANJUTAN ADALAH FONDASI MOBILITAS PERKOTAAN YANG LEBIH EFISIEN DAN BERKUALITAS



"Perlu kita ingat bahwa keberhasilan sistem ini tetap bertumpu pada sinergi, operator wajib menjaga standar keselamatan dan masyarakat perlahan beralih untuk menjadikan angkutan umum sebagai pilihan utama bermobilitas sehari-hari," pungkasnya.

Optimalkan Operasional Angkutan Barang, Kemenhub Apresiasi Operator Yang Tertib Aturan, Sekaligus Tertibkan Kendaraan Melanggar

Kementerian Perhubungan menyimpulkan pengawasan kendaraan angkutan barang saat ini menunjukkan tren peningkatan, namun tingkat pelanggaran masih relatif tinggi dan didominasi oleh pelanggaran daya angkut dan dokumen yang mengindikasikan bahwa permasalahan utama terletak pada rendahnya kepatuhan operasional dan administrasi pelaku usaha.



Wujud Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan yang terus berupaya dan berkomitmen dalam menciptakan kendaraan angkutan barang yang berkeselamatan. Dalam hal ini, Kementerian Perhubungan memberikan apresiasi kepada operator yang mematuhi aturan.

"Kemenhub mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi para operator angkutan barang yang telah mendukung dan mematuhi kebijakan pengaturan operasional distribusi logistik. Mari kita sama-sama wujudkan keselamatan bersama," ujar Direktur Jenderal Perhubungan Darat Aan Suhanan di Jakarta, Minggu (5/4).

Pada kesempatan ini, pihaknya juga menertibkan kendaraan yang melakukan pelanggaran. Pengawasan dilakukan melalui 89 Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) yang tersebar di Indonesia.

"Pada tahun ini dari tanggal 1 Januari hingga 3 April tercatat sebanyak 606.799 kendaraan telah diperiksa. Dari angka tersebut sejumlah 157.821 kendaraan atau sekitar 26,01% melakukan pelanggaran. Sementara 448.978 kendaraan

lainnya atau 73,99% dinyatakan tidak melanggar," ungkapnya.

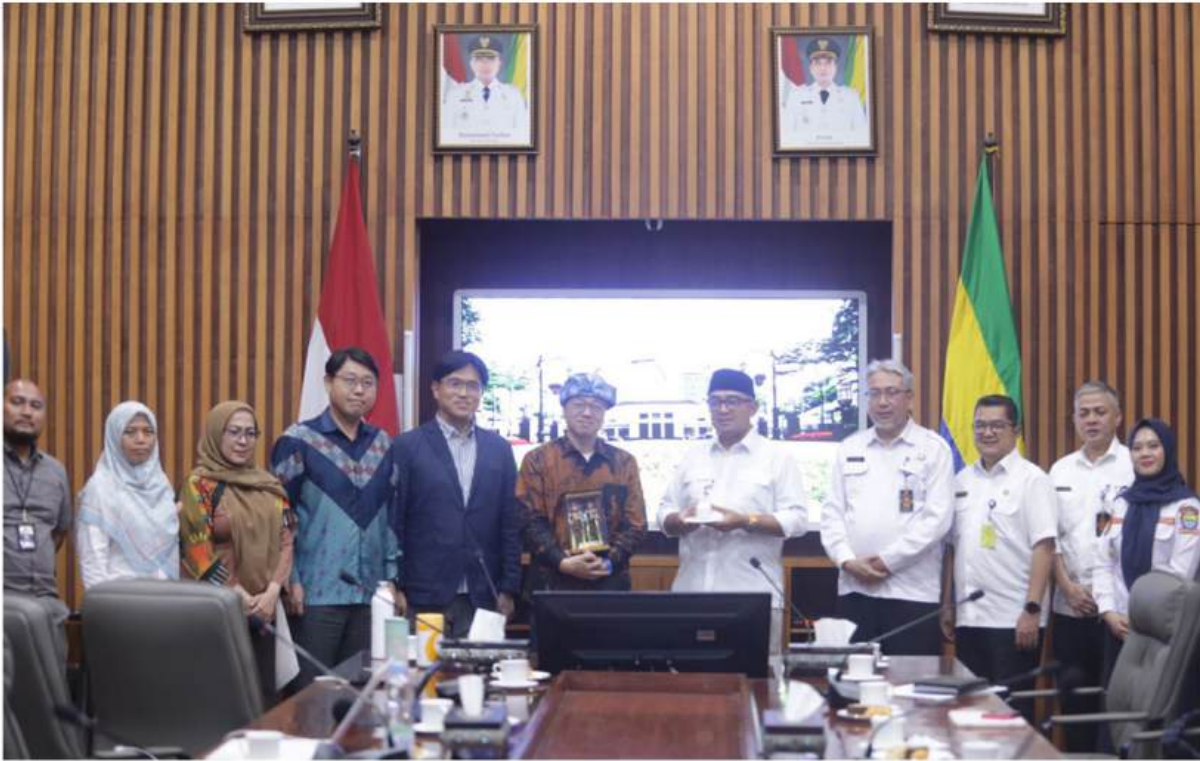
Dari jumlah kendaraan angkutan barang yang melakukan pelanggaran ditemukan jumlah pelanggaran sebanyak 214.553 yang terdiri dari pelanggaran daya angkut sebanyak 104.043 kendaraan (48,49%); pelanggaran dimensi sebanyak 5.785 kendaraan (2,70%); pelanggaran dokumen sebanyak 104.011 kendaraan (48,48%); pelanggaran persyaratan teknis sebanyak 4 kendaraan dan pelanggaran tata cara muat sebanyak 710 kendaraan (0,33%).

"Pada masa sosialisasi menuju *Zero Over Dimension Over Loading* (ODOL) 2027 ini penindakan dilakukan kepada para pelanggar yang dilakukan secara selektif. Seperti diantaranya pemberian peringatan sebanyak 45.545 kendaraan (92,94%), sanksi tilang sebanyak 1.924 kendaraan (3,93%), sanksi tilang kepolisian pada 1 kendaraan dan tilang UPPKB lainnya sebanyak 1.533 (3,13%)," jelas Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan.

Lima perusahaan dengan pelanggar tertinggi yaitu PT. SIL sebanyak 508 kendaraan, PT. IP dengan 464 kendaraan, CV. JK sebanyak 382 kendaraan, PT. SA sebanyak 363 kendaraan dan PT. SBJ dengan 363 kendaraan.

"Dari hasil pengawasan yang dilakukan, terdapat lima komoditi muatan angkutan barang dengan pelanggaran tertinggi di antaranya barang campuran sebanyak 10.833 kendaraan, Pasir sebanyak 9.760 kendaraan, dan barang paket sebanyak 8.702 kendaraan, perkebunan sebanyak 5.397 kendaraan, dan semen sebanyak 4.234 kendaraan," katanya.

"Ke depan, menuju *Zero ODOL* 2027 akan dilakukan percepatan perbaikan dan optimalisasi sistem Jembatan Timbang Online (JTO) dan *Weigh In Motion* (WIM) di UPPKB untuk meningkatkan kualitas pengawasan serta meningkatkan kepatuhan administrasi melalui integrasi data pengawasan dan penguatan koordinasi dengan *stakeholder* terkait," pungkasnya.



Wujudkan Sistem Transportasi Perkotaan Terintegrasi, Kemenhub Bahas Pembangunan BRT BBMA

Dalam upaya mewujudkan sistem mobilitas perkotaan yang lebih terintegrasi, efisien, dan berkelanjutan di kawasan Bandung Raya, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan bahas keberlanjutan pembangunan *Bus Rapid Transit* Bandung Basin Metropolitan Area (BRT BBMA) bersama Pemerintah Kota Bandung di Kantor Wali Kota Bandung, Rabu (13/5).

Selaku Ketua *Project Implementation Unit* (PIU), Direktur Angkutan Jalan, Muiz Thohir menyampaikan kehadiran BRT nantinya diharapkan mampu menjadi pilihan utama masyarakat dalam bertransportasi sehari-hari melalui pelayanan yang aman, nyaman, tepat waktu, dan mudah diakses.

"Pembangunan BRT BBMA bukan sekedar pembangunan fisik halte maupun fasilitas koridor, melainkan bagian dari upaya membangun ekosistem transportasi publik yang terhubung dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat," ungkap Direktur Angkutan Jalan, Muiz Thohir di Jakarta, Jumat (15/5).

Ia menyebut keberhasilan implementasi BRT BBMA juga sangat bergantung pada dukungan dan sinergi seluruh pihak, baik pemerintah

pusat, pemerintah daerah, pelaksana pekerjaan, maupun masyarakat pengguna layanan.

Adapun untuk penyiapan operasional BRT BBMA di tahun 2027 mendatang, terdapat beberapa lokasi yang akan dibangun menjadi depo, yaitu Depo Leuwipanjang yang dapat menampung sebanyak 20 unit bus dan Depo Cicaheum dengan kapasitas 59 bus.

Pada kesempatan ini, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan juga menekankan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan sistem transportasi perkotaan yang terintegrasi melalui BRT BBMA. "Saat ini pekerjaan di Depo Leuwipanjang dan Depo Cicaheum sedang berjalan. Di lapangan memang ditemukan beberapa tantangan seperti angkutan umum yang masih beroperasi di terminal Cicaheum dan juga masih terdapat pedagang di area terminal tersebut," ujarnya.

Kendati demikian, pihaknya menyatakan akan segera menyelesaikan beberapa permasalahan yang ditemukan di lapangan sehingga diharapkan progres penyiapan operasional BRT berjalan dengan lancar.



Kemenhub Catat Tingkat Kepatuhan Kendaraan Angkutan Barang Capai 75%

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan terus berupaya dan berkomitmen dalam mewujudkan kendaraan angkutan barang yang berkeselamatan. Sejak Januari hingga 12 Juni 2026, tercatat sebanyak 939.322 kendaraan atau 75,64% tidak melakukan pelanggaran, sementara 302.561 kendaraan atau 24,36% melakukan pelanggaran.

"Kami melakukan pengawasan di 89 Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) yang tersebar di Indonesia. Dari Januari hingga 12 Juni 2026, sudah sebanyak 1.241.883 kendaraan yang tercatat dalam pengawasan," ungkap Direktur Jenderal Perhubungan Darat Aan Suhanan di Jakarta, Sabtu (13/6).

Dari jumlah kendaraan angkutan barang yang melakukan pelanggaran ditemukan jumlah pelanggaran sebanyak 407.534 yang terdiri dari pelanggaran daya angkut sebanyak 195.377 kendaraan (47,94%); pelanggaran dimensi sebanyak 6.410 kendaraan (1,57%); pelanggaran dokumen sebanyak 203.656 kendaraan (49,97%); pelanggaran persyaratan teknis sebanyak 34 kendaraan (0,01%); dan pelanggaran tata cara muat sebanyak 2.057 kendaraan (0,50%).

Lima perusahaan dengan pelanggar tertinggi yaitu PT. SIL sebanyak 1.041 kendaraan, PT. IP dengan 967 kendaraan, PT. SA sebanyak 749 kendaraan, CV. SKE sebanyak 701 kendaraan, dan PT. EW sebanyak 688 kendaraan.

Ia menyebut kinerja pengawasan kendaraan angkutan barang pada periode berjalan tahun 2026 menunjukkan peningkatan capaian, dengan tingkat pengawasan terhadap LHR kendaraan angkutan barang sebesar 7,74% lebih tinggi dibandingkan capaian tahun 2025 sebesar 7,47%.

Dukung Zero ODOL 2027, Kemenhub Bangun Aplikasi SUMBA

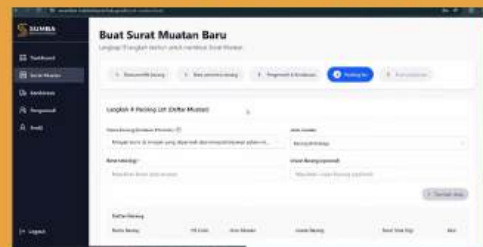
Dalam rangka mendukung dan turut menyukseskan program Bebas Kendaraan Lebih Dimensi dan Lebih Muatan 2027, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan membangun aplikasi SUMBA (Surat Muatan Barang).

Mewakili Direktur Angkutan Jalan, Kasubdit Angkutan Barang, Handa Lesmana pada kegiatan Sosialisasi Surat Muatan Barang bagi Perusahaan Angkutan Barang yang digelar secara daring, Kamis (25/06) menyatakan aplikasi SUMBA merupakan aplikasi *e-manifest* angkutan barang dengan menyediakan sistem pendataan dan pemantauan muatan kendaraan secara digital, akurat dan terintegrasi.

"Aplikasi ini dibangun guna meningkatkan angka keselamatan, menekan kerusakan infrastruktur, serta mendukung penegakan regulasi angkutan barang yang terintegrasi dengan sistem Pemberitahuan Barang (PAB Darat) yang akan dikembangkan oleh Kementerian Perdagangan dan Kementerian Keuangan," jelasnya.

Dalam sistem ini data mengenai kendaraan, data transporter, data pengemudi, data pemilik barang, data penerima barang dan data barang (jenis, kelompok, dan jumlah) akan terintegrasi.

"Dashboard pada *e-manifest* nanti akan menampilkan data pergerakan barang dan logistik nasional, jenis komoditas yang diangkut, pola rute dan distribusi barang, serta profil profil transporter dan pengemudi," paparnya.



Pada kegiatan ini juga dijelaskan panduan penggunaan atau tata cara penggunaan aplikasi SUMBA.

"Sosialisasi seperti ini akan dilakukan kepada semua perusahaan angkutan barang dan diharapkan para peserta akan memperoleh pemahaman mengenai fungsi, manfaat, dan mekanisme penggunaan Aplikasi SUMBA. Dengan begitu, semua pemangku kepentingan dapat mendukung terwujudnya penyelenggaraan angkutan barang yang lebih tertib, aman dan berkeselamatan," tutupnya.



Pastikan Kelaikan Kendaraan, Kemenhub Lakukan Pengawasan 1,7 Juta Perjalanan Bus Periode Januari–Juni 2026

Terus memperkuat pengawasan penyelenggaraan angkutan orang guna memastikan aspek kelaikan kendaraan dan kepatuhan operator, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan melakukan pengawasan terhadap bus antar kota antar provinsi (AKAP) dilakukan secara digital melalui pemanfaatan aplikasi *Terminal Online System* (TOS) yang telah diterapkan di 115 Terminal Penumpang Tipe A di seluruh Indonesia.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan Suhanan, mengatakan pemanfaatan teknologi digital melalui aplikasi TOS memungkinkan petugas melakukan pengawasan angkutan umum secara lebih efektif. Ia mengungkapkan, berdasarkan hasil pengawasan pada TOS periode 1 Januari s/d 12 Juni 2026, layanan AKAP yang terpantau berangkat melalui Terminal Tipe A (TTA) mencapai 1.709.993 kali perjalanan dan layanan AKAP yang datang sebanyak 1.759.161 kali perjalanan serta mengangkut 22.769.512 penumpang berangkat dan 21.790.578 penumpang datang melalui TTA.

"Dengan sistem ini, kami dapat memantau operasional kendaraan secara lebih efektif dan dapat mengidentifikasi berbagai pelanggaran yang berpotensi mempengaruhi keselamatan penumpang dan pengguna jalan lainnya. Kami telah mencatat sejumlah perjalanan bus yang dinyatakan laik jalan serta bus yang terindikasi melakukan pelanggaran," ujarnya di Jakarta, pada Sabtu (13/6).

Adapun dari hasil pengawasan terhadap kendaraan yang berangkat dari 115 TTA, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menemukan sebanyak 989.176 kali perjalanan (57,85%) terindikasi melakukan pelanggaran dan 720.817 kali perjalanan (42,15%) dinyatakan tidak melanggar. Sementara itu, dari bus AKAP yang datang, tercatat sebanyak 1.011.044 kali perjalanan (57,47%) terindikasi

melakukan pelanggaran dan 748.117 kali perjalanan (42,33%) dinyatakan tidak melakukan pelanggaran.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan Suhanan, menjelaskan rincian pelanggaran yang ditemukan pada bus yang berangkat dari TTA meliputi 579.641 pelanggaran penyimpangan trayek, lalu pelanggaran masa berlaku uji berkala yang telah kedaluwarsa sebanyak 265.673 kali pelanggaran, dan 447.961 kali pelanggaran masa berlaku KPS yang kedaluwarsa.

"Kepatuhan operator terhadap persyaratan administrasi dan teknis kendaraan masih harus ditingkatkan karena ini hal dasar yang harus dipenuhi untuk menjamin keselamatan masyarakat. Tentu temuan ini juga menjadi bahan evaluasi kami ke depannya untuk terus memperkuat pengawasan serta meningkatkan pembinaan kepada operator," jelasnya.

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat juga mencatat sejumlah perusahaan otobus (PO) yang paling banyak melakukan pelanggaran di antaranya PT SSR, PT EMPS, PT PP, PT SJML, dan PT BDM. Dan telah melakukan penindakan terhadap PO tersebut serta akan terus melakukan tindak lanjut terhadap hasil pengawasan melalui pembinaan, pengawasan berkala, serta penguatan pemanfaatan sistem digital guna mendorong peningkatan kepatuhan operator angkutan orang.

"Prinsip kami jelas, keselamatan harus menjadi prioritas utama dan kami mengimbau seluruh operator untuk memastikan armada yang dioperasikan laik jalan dengan memenuhi seluruh persyaratan baik teknis maupun administratif. Sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan yang aman, nyaman, dan berkeselamatan," tutup Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan Suhanan.



PENANGANAN KENDARAAN ODOL TIDAK BISA LAGI HANYA MENGANDALKAN PENGAWASAN KONVENSIIONAL. MAKA DIPERLUKAN SISTEM DAN APLIKASI YANG LEBIH PRESISI DAN TRANSPARAN

Serius Tangani Kendaraan Lebih Dimensi dan Lebih Muatan, Kemenhub Susun *Quick Win*

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan telah menyiapkan langkah dalam percepatan (*quick win*) pada penanganan kendaraan *Over Dimension Over Loading* (ODOL) sebagai bagian dari upaya menuju target Zero kendaraan ODOL 2027. Hal ini diuji coba pada 1 Juni 2026 melalui penguatan sistem pengawasan, prasarana, dan regulasi.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan Suhanan menyampaikan, penanganan kendaraan lebih dimensi dan lebih muatan tidak bisa lagi hanya mengandalkan pengawasan konvensional. Ia menilai, dalam pengawasan praktik ODOL diperlukan sistem dan aplikasi yang lebih presisi dan transparan.

"Kami membuat *quick win* atau percepatan untuk pengawasan, ada tiga variabelnya. Pertama soal sistem dan aplikasi yang dibangun harus dapat mengawasi secara objektif, presisi, dan 24 jam dengan berbasis IT, prosesnya diharapkan akan lebih transparan dan mengurangi kontak langsung antara pengemudi dengan petugas," kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan Suhanan dalam kegiatan Sosialisasi Kebijakan dan *Public Hearing*: "Menuju Implementasi Indonesia Zero ODOL 2027" di Semarang, Jawa Tengah, Rabu (6/5).

Ia juga menjelaskan, penguatan pengawasan berbasis teknologi ini menjadi upaya dalam meminimalisir potensi praktik pungutan liar (pungli) yang selama ini dianggap masih kerap terjadi. Sehingga jika nantinya masih ditemukan adanya praktik pungli dalam proses pengawasan angkutan barang, masyarakat bisa langsung melaporkan.

Selain penguatan sistem pengawasan, Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan Suhanan melanjutkan, variabel lainnya dalam *quick win* yakni penguatan prasarana. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat akan lebih mengoptimalkan titik penimbangan angkutan barang, baik di UPPKB hingga ruas jalan tol yang dilengkapi



AAN SUHANAN

Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Pengawasan perlu dilakukan sejak awal titik pemuatan barang termasuk di kawasan industri, jadi kendaraan yang menuju jalan umum diharapkan sudah memenuhi ketentuan muatan dan dimensi. Kami akan tingkatkan pemanfaatan WIM dan JTO untuk pengawasan sekaligus untuk penegakan hukum nantinya

Regulasi dan SOP ini penting agar memberikan pemahaman kepada rekan-rekan bahwa penanganan kendaraan ODOL ini harus satu persepsi. Sehingga tidak merugikan pihak manapun dan sistemnya harus berkeadilan.

dengan teknologi *Weigh In Motion* (WIM) dan Jembatan Timbang Online (JTO) yang terhubung dengan sistem ETLE atau sistem pengawasan digital.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan Suhanan menambahkan, variabel ketiga dalam langkah percepatan ini yakni harmonisasi regulasi dan SOP agar pengawasan dan penegakan hukum praktik kendaraan ODOL dipahami dengan persepsi yang sama mulai dari proses deteksi pelanggaran, validasi data, pengiriman surat konfirmasi, hingga proses penilaian atau penegakan hukumnya.

Saat ini, proses revisi UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sedang berjalan untuk penegakan hukum yang lebih berkeadilan dan menyesuaikan dengan ekosistem angkutan barang saat ini.



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

5 Kebiasaan Sepele

Bikin BBM Kendaraan Cepat Habis!

1.



Gas Mendadak

Akselerasi agresif membuat konsumsi bahan bakar meningkat.

2.



Tekanan Ban Kurang

Ban tidak ideal membuat mesin bekerja lebih berat.

3.



Beban Berlebih

Muatan yang tidak perlu menambah konsumsi BBM.

4.



Mesin Idle Terlalu Lama

Mesin menyala saat diam hanya membuang bahan bakar.

5.



Jarang Service

Kondisi mesin yang tidak optimal menurunkan efisiensi BBM.



**Berkendara
Cerdas,
BBM Hemat,
Perjalanan
Selamat!**



Kebiasaan kecil hari ini,
berdampak besar
untuk lingkungan dan masa depan





Kemenhub Uji Coba Terbatas ETLE Untuk Penanganan Kendaraan Lebih Dimensi dan Lebih Muatan

Melalui uji coba terbatas penegakan hukum berbasis ETLE dan Weigh In Motion (WIM), Direktorat Jenderal Perhubungan Darat terus memperkuat pengawasan kendaraan angkutan barang guna meningkatkan keselamatan transportasi, menjaga infrastruktur jalan, dan mendukung terwujudnya sistem logistik nasional yang lebih tertib dan berdaya saing.





"Rencana aksi ini disusun sebagai upaya komprehensif pemerintah untuk lebih meningkatkan keselamatan transportasi, menekan kerusakan infrastruktur jalan, dan memperkuat daya saing sistem logistik nasional"

Aan Suhanan

Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan melakukan uji coba terbatas penegakan hukum melalui Alat Bukti Rekaman Elektronik (ETLE) untuk menangani permasalahan kendaraan lebih dimensi dan lebih muatan yang dimulai sejak bulan Januari 2026.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Aan Suhanan dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (13/5) menyatakan hal ini merupakan tanggung jawab Kementerian Perhubungan sesuai Rencana Aksi Nasional Penanganan Kendaraan Lebih Dimensi dan Lebih Muatan yang menjadi bagian dari Rancangan Peraturan Presiden tentang Penguatan Logistik Nasional.

Ia menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi seperti ETLE untuk kegiatan pengawasan, pencatatan serta penindakan kendaraan barang di fasilitas penimbangan. Adapun, uji coba terbatas ini dilakukan pada tiga lokasi Unit Penimbangan Kendaraan Bermotor berbasis *Weigh In Motion* di antaranya UPPKB Kertapati, Talang Kelapa dan Balonggandu.

"Melalui ETLE tercatat bahwa hingga 11 Mei 2026, terdapat sebanyak 98.983 pelanggaran kendaraan angkutan barang. Provinsi Sumatera Selatan menjadi wilayah tertinggi yang memiliki pelanggaran sebanyak 71.402 atau 73%, peringkat kedua wilayah Jawa Barat sebanyak 10.347 atau 11% dan peringkat ketiga di wilayah Jabodetabek sebanyak 6.199 atau 6%. Sisanya ada dari berbagai wilayah lain," jelasnya.

Adapun jenis pelanggaran berturut-turut didominasi oleh pelanggaran daya angkut sebanyak 55.462 atau 57%, pelanggaran dokumen sebanyak 42.427 atau 43%, dan pelanggaran tata cara kuat sebanyak 94 pelanggaran.

Kepada para pelanggar, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat telah mencetak dan mengirimkan surat sebagai bentuk tindak lanjut penegakan hukum. Sistem ini masih bersifat uji coba terbatas dan ke depan akan dilakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan kelancaran sistem pengawasan dan penegakan hukum berbasis WIM dan ETLE berjalan dengan baik.



**JELAJAH SEMAKIN
MUDAH DENGAN
TRANSPORTASI
YANG TERINTEGRASI**

DANAU TOBA

Danau Toba bukan sekadar destinasi wisata, melainkan salah satu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yang menjadi wajah pariwisata Indonesia di mata dunia. Keindahan kaldera vulkanik terbesar di dunia ini menawarkan pengalaman alam, budaya, dan sejarah yang begitu kaya. Namun, pengalaman wisata tidak hanya ditentukan oleh destinasi yang indah, melainkan juga oleh kemudahan perjalanan menuju dan di dalam kawasan tersebut.

Melalui pengembangan sistem transportasi yang terintegrasi, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat bersama para pemangku kepentingan terus menghadirkan konektivitas antarmoda yang bantu memudahkan masyarakat maupun wisatawan menjangkau berbagai titik destinasi di kawasan Danau Toba. Integrasi ini menjadi bagian penting dalam mendukung mobilitas yang aman, nyaman, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat daya saing pariwisata nasional.

Pengembangan transportasi terintegrasi di KSPN Danau Toba juga memberikan dampak yang lebih luas bagi masyarakat setempat. Kemudahan akses mendorong pertumbuhan sektor pariwisata, membuka peluang usaha bagi pelaku UMKM, memperluas pasar produk lokal, serta meningkatkan aktivitas ekonomi di berbagai kawasan sekitar Danau Toba. Dengan demikian, transportasi menjadi salah satu penggerak pembangunan daerah yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Penguatan konektivitas antarmoda di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat berkomitmen menghadirkan layanan transportasi yang semakin mudah diakses, aman, dan andal. Karena pada akhirnya, transportasi yang terintegrasi bukan hanya menghubungkan satu moda dengan moda lainnya, tetapi juga menghubungkan masyarakat dengan potensi daerah, peluang ekonomi, dan keindahan Indonesia yang layak dinikmati oleh semua.



HOW TO REACH DANAU TOBA?

Bagi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, konektivitas bukan hanya tentang membangun infrastruktur atau menyediakan kendaraan. Konektivitas adalah memastikan setiap perjalanan berlangsung tanpa hambatan, mulai dari kedatangan di bandara, perpindahan menuju terminal atau pelabuhan, hingga tiba di destinasi wisata. Semakin baik integrasi antarmoda, semakin besar pula manfaat yang dirasakan masyarakat dan wisatawan.



Perjalanan menuju Danau Toba kini dapat dimulai melalui Bandara Internasional Kualanamu di Medan maupun Bandara Internasional Sisingamangaraja XII di Silangit. Kedua bandara tersebut menjadi pintu gerbang utama yang menghubungkan wisatawan dari berbagai daerah di Indonesia maupun mancanegara menuju kawasan Danau Toba.



Setelah tiba di bandara, perjalanan dilanjutkan menggunakan layanan DAMRI KSPN yang melayani berbagai rute strategis menuju destinasi wisata di sekitar Danau Toba. Kehadiran angkutan ini memberikan alternatif transportasi yang aman, nyaman, dan terjangkau bagi wisatawan tanpa harus bergantung pada kendaraan pribadi. Selain meningkatkan aksesibilitas, layanan DAMRI juga membantu mengurangi kepadatan lalu lintas serta mendukung mobilitas yang lebih ramah lingkungan.

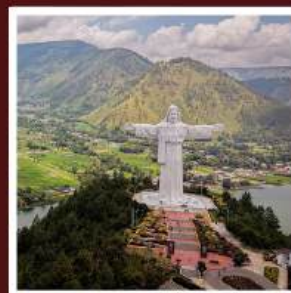


Setibanya di kawasan Danau Toba, perjalanan dapat diteruskan menggunakan moda penyeberangan menuju Pulau Samosir. Pelabuhan Ajibata, Balige, Tigaras, maupun pelabuhan lainnya telah terhubung melalui layanan kapal penyeberangan yang beroperasi secara rutin. Moda penyeberangan tidak hanya menjadi penghubung antarwilayah, tetapi juga menghadirkan pengalaman tersendiri bagi wisatawan yang dapat menikmati panorama Danau Toba dari atas perairan.

Integrasi antarmoda tersebut memungkinkan wisatawan berpindah dari pesawat, angkutan jalan, hingga kapal penyeberangan dengan lebih mudah. Perjalanan yang sebelumnya membutuhkan perencanaan yang cukup rumit kini menjadi lebih sederhana karena setiap moda saling melengkapi dalam satu rantai layanan transportasi.

Sejalan dengan semangat pembangunan transportasi berkelanjutan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat terus mendorong peningkatan kualitas layanan angkutan jalan dan penyeberangan melalui penyediaan sarana yang laik operasi, peningkatan keselamatan perjalanan, penguatan konektivitas antarmoda, serta pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Danau Toba telah membuktikan bahwa transportasi yang terintegrasi mampu menghadirkan pengalaman perjalanan yang lebih nyaman sekaligus memperkuat daya tarik destinasi wisata. Ketika pesawat, angkutan jalan, dan penyeberangan saling terhubung dalam satu sistem yang terencana, perjalanan tidak lagi sekadar menjadi cara untuk mencapai tujuan, tetapi menjadi bagian dari pengalaman wisata itu sendiri.



Sanksi Tegas PO Yang Tidak Masuk Terminal

Tegas berkomitmen dalam meningkatkan keselamatan angkutan umum dengan mewajibkan seluruh bus masuk terminal serta memberikan sanksi tegas kepada operator yang melanggar ketentuan.

Pemberian sanksi tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat apabila ditemukan Perusahaan Otobus (PO) yang tidak masuk terminal. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan Suhanan dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin (11/5).

"Sanksi yang diberikan dapat berupa sanksi administratif hingga pembekuan izin trayek dan pencabutan izin penyelenggaraan angkutan orang. Hal ini tercantum dalam UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek," ungkap Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan Suhanan.

Kewajiban masuk terminal bagi setiap bus ialah untuk memastikan kendaraan yang akan dioperasikan laik jalan, pengemudi sehat dan penumpang di dalam bus terdata dengan baik. Petugas juga akan mengecek kelengkapan administrasi, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan tidak segan untuk memberhentikan perjalanan apabila kendaraan tidak memenuhi persyaratan.

"Sebagai perpanjangan tangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Balai Pengelola Transportasi Darat di seluruh wilayah kerjanya melalui satuan pelayanan di Terminal Tipe A wajib memperkuat pengawasan kelaikan operasional angkutan jalan melalui inspeksi keselamatan atau *rampcheck*," jelasnya.

la menambahkan, hal itu termasuk evaluasi menyeluruh terhadap perizinan, dokumen uji KIR, kepatuhan perusahaan otobus terhadap

standar keselamatan angkutan jalan, serta pengawasan terhadap kompetensi dan kesehatan pengemudi.

Di samping mewajibkan bus masuk ke terminal, Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan Suhanan juga menegaskan akan melakukan audit menyeluruh kepada setiap operator terkait pemenuhan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (SMK PAU) sebagaimana yang tertuang dalam PM Nomor 85 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum. Terdiri dari 10 elemen di antaranya Komitmen dan Kebijakan, Pengorganisasian, Manajemen Bahaya dan Risiko, Fasilitas Pemeliharaan dan Perbaikan Kendaraan Bermotor, Dokumentasi dan Data, Peningkatan Kompetensi dan Pelatihan, Tanggap Darurat, Pelaporan Kecelakaan Internal, Monitoring dan Evaluasi, dan Pengukuran Kinerja.



Keselamatan Lalu Lintas

Demi meningkatkan aspek keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta menurunkan risiko fatalitas kecelakaan pada angkutan umum yang seringkali menimbulkan banyak korban. Maka, perlu memperkuat sosialisasi budaya keselamatan transportasi kepada seluruh pihak baik pengemudi, perusahaan otobus serta masyarakat.





Kemenhub dan UNICEF

Perkuat Edukasi Keselamatan Jalan

Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, bekerjasama dan didukung sepenuhnya oleh UNICEF Indonesia dalam menyelenggarakan kegiatan Edukasi Keselamatan Jalan dalam Implementasi Zona Selamat Sekolah (ZoSS) di Kota Bandung, Jawa Barat.



Kegiatan yang dilaksanakan di Bandung ini diikuti oleh 84 peserta yang terdiri dari 64 siswa/i, 12 guru, dan 8 petugas pemandu penyeberangan dari delapan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang telah memiliki fasilitas ZoSS.

Program ini merupakan bagian dari upaya bersama untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan perilaku keselamatan lalu lintas sejak usia dini.

Kegiatan ini dibuka oleh Direktur Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan, Yusuf Nugroho, dan dihadiri oleh *Chief of Health* UNICEF Indonesia, Dr. Mrunal Shetye, Kepala Bidang Sarana BPTD Kelas I Provinsi Jawa Barat, Kepala Seksi Perlengkapan Jalan Perhubungan Kota Bandung, Dimas Sodik Makail, Perwakilan Dinas Pendidikan Kota Bandung, Komunitas dan Forum Anak Kota Bandung.

Dalam sambutan pembukaannya, Direktur Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan menyampaikan bahwa keselamatan jalan merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan, termasuk lingkungan sekolah.

Melalui edukasi yang berkelanjutan, diharapkan pelajar dapat menjadi pelopor keselamatan jalan sekaligus agen perubahan dalam membangun budaya tertib lalu lintas di masyarakat.

Kegiatan ini merupakan wujud kolaborasi antara pemerintah dan UNICEF Indonesia dalam mendukung peningkatan keselamatan transportasi jalan di Indonesia. Selain memberikan pemahaman mengenai keselamatan berlalu lintas, peserta

juga mendapatkan edukasi mengenai fungsi dan manfaat fasilitas ZoSS sebagai sarana perlindungan bagi pejalan kaki, khususnya pelajar, di kawasan sekolah.

Rangkaian kegiatan meliputi penyampaian materi edukasi keselamatan jalan dan pemanfaatan fasilitas ZoSS, sesi praktik penggunaan fasilitas keselamatan jalan, diskusi kelompok berbasis *critical thinking* untuk mengidentifikasi setiap permasalahan keselamatan di lingkungan sekolah, sesi berbagi pengalaman antar pemangku kepentingan, hingga permainan edukatif yang inspiratif dan partisipatif.

Melalui kegiatan ini, Kementerian Perhubungan dan UNICEF Indonesia juga mendorong demi terbangunnya sinergi yang lebih kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sekolah, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan berkeselamatan.

Sebagai bentuk dukungan terhadap implementasi ZoSS di sekolah, Direktorat Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan turut menyerahkan perlengkapan pendukung bagi petugas penyeberangan sekolah yang terdiri atas *hand stop*, rompi keselamatan, topi, dan peluit untuk menunjang operasional pengamanan penyeberangan siswa.

Melalui kegiatan edukasi ini diharapkan pemanfaatan fasilitas ZoSS dapat semakin optimal sehingga mampu mendukung terwujudnya budaya keselamatan jalan yang berkelanjutan serta mewujudkan visi keselamatan transportasi jalan bagi seluruh pengguna jalan, khususnya anak-anak dan remaja.

Perkuat Keselamatan Logistik, Kemenhub Gelar Bimtek *Safety Driving* Pengemudi Angkutan Barang

Industri angkutan barang berperan penting dalam perekonomian. Data dari Korlantas menunjukkan 10% kecelakaan di jalan banyak melibatkan angkutan barang. Kecelakaan seperti ini dapat mempengaruhi perekonomian nasional karena korbannya mayoritas berusia produktif, menyebabkan kerusakan materil, dan mempengaruhi pelayanan jasa angkutan.

Upaya meningkatkan keselamatan industri angkutan logistik terus dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan dengan menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Kompetensi Pengemudi Perusahaan Angkutan Barang Umum (*Safety Driving*). Bimtek ini digelar pada 15-16 April 2026 di Politeknik Penerbangan Surabaya, Jawa Timur.

Bimtek yang terselenggara atas kerja sama antara Direktorat Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan dengan PT Gaya Makmur Mobil (GMM) ini, diikuti oleh 38 perusahaan angkutan barang, yang terdiri dari 58 pengemudi dan 20 orang perwakilan manajemen perusahaan. Direktur Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan, Yusuf Nugroho menegaskan, kegiatan ini merupakan komitmen pemerintah bersama pelaku usaha dalam menjamin keselamatan industri angkutan barang yang dinilai berperan penting dalam perekonomian nasional.

Ia mengatakan, faktor manusia memberikan kontribusi besar pada penyebab terjadinya kecelakaan. Maka perlu dilakukan upaya guna meningkatkan kompetensi pengemudi angkutan barang terutama kemampuan *defensive* pada keadaan darurat.

Para pengemudi yang mengikuti bimtek ini mendapatkan sejumlah materi yakni tata cara muat pengangkutan barang di jalan, keterampilan dan pemahaman *pre-trip inspection*. Kemudian, dalam bimtek juga diberikan materi untuk klasifikasi dan identifikasi barang yang diangkut, kecakapan dan keterampilan mengemudi, *defensive driving*, hingga pemahaman peraturan dan regulasi yang berlaku.

"Peran dan dukungan manajemen perusahaan adalah hal yang tidak kalah penting. Harapannya seluruh perusahaan angkutan barang dapat menerapkan Standar Operasional Prosedur secara konsisten dan disesuaikan dengan regulasi pemerintah," kata Direktur Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan, Yusuf Nugroho.





Selain mendapatkan materi secara teoritis, para peserta bimtek juga melaksanakan sesi praktik *safety driving* dan sesi wawancara dalam rangka penilaian untuk kompetensi *safety driving*. Direktur Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan, Yusuf Nugroho pun berharap, dengan diadakannya bimtek *safety driving* yang berkelanjutan, pelayanan angkutan barang dapat berjalan lebih aman dan efisien.

Melalui kegiatan ini diharapkan pihak manajemen perusahaan dapat mengatur jam kerja para pengemudi sesuai aturan yang berlaku. Aturan jam kerja bagi pengemudi dinilai sebagai hal yang penting untuk mencegah kelelahan pada pengemudi sehingga dapat menekan potensi terjadinya kecelakaan dan fatalitas. "Mari bekerja sama dan bersinergi mewujudkan pelayanan transportasi angkutan barang yang lebih aman, efisien, dan berkelanjutan," tutupnya.



Kemenhub Tegaskan SMK PAU Jadi Instrumen Penting Wujudkan Keselamatan Transportasi Jalan

Pencapaian target penurunan angka fatalitas kecelakaan hingga 50% pada 2030 memerlukan komitmen dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, operator angkutan, hingga masyarakat.

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan menegaskan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (SMK PAU) merupakan instrumen penting dalam upaya wujud keselamatan transportasi jalan yang berkelanjutan.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan Suhanan menyebut bahwa keselamatan jalan adalah isu serius yang telah menjadi perhatian nasional bahkan global karena berdampak langsung pada keselamatan masyarakat luas, hal ini sejalan dengan komitmen global *World Health Organization* (WHO) melalui *Decade of Action for Road Safety 2021-2030*, yang merupakan kelanjutan dari dekade sebelumnya (2011-2020). Jika dekade pertama berfokus dengan "stabilisasi" angka kecelakaan, maka pada dekade kedua ini ditetapkan target, yakni



dapat mengurangi minimal 50% jumlah kematian dan cedera akibat kecelakaan lalu lintas pada tahun 2030, yang juga selaras dengan Target 3.6 dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) PBB untuk menurunkan angka kematian dan cedera akibat kecelakaan lalu lintas di dunia.

Ia menyampaikan Indonesia telah memiliki Rencana Umum Nasional pada sektor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RUNK LLAJ) sebagai kerangka kebijakan nasional dalam penanganan keselamatan jalan lintas sektor.

RUNK dilaksanakan oleh berbagai Kementerian/Lembaga melalui lima pilar utama, yakni pada manajemen keselamatan jalan yang dikoordinasikan Bappenas; jalan berkeselamatan dikoordinasikan Kementerian PU;

kendaraan yang berkeselamatan oleh Kemenhub; pengguna jalan yang berkeselamatan oleh Polri; serta penanganan pasca kecelakaan (*post-crash response*) untuk menekan tingkat fatalitas korban oleh Kemenkes.

Meski demikian, Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan Suhanan mengatakan, keselamatan jalan masih menjadi tantangan serius yang membutuhkan penanganan sistemik dan berkelanjutan, adapun jika melihat data Polri pada tahun 2025 tercatat 158.508 kejadian kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dengan 24.296 korban meninggal dunia. Sehingga ia menegaskan, SMK PAU bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan instrumen penting dalam pengelolaan keselamatan yang berdampak langsung pada operasional kendaraan hingga pengemudi.

“Jadi penerapan SMK PAU ini tidak bisa hanya dilihat sebagai persyaratan administratif tapi juga sebagai persyaratan operasional. Diharapkan seluruh operator bisa menjamin armadanya laik jalan dan pengemudinya juga laik untuk mengemudikan kendaraan,” tegasnya.

Ia juga menuturkan upaya peningkatan keselamatan jalan telah memiliki arah kebijakan yang jelas dengan menetapkan target pada penurunan angka fatalitas kecelakaan secara nasional. Sesuai dengan deklarasi Aksi Keselamatan Jalan WHO di dekade kedua, saat ini pemerintah Indonesia menargetkan penurunan angka fatalitas kecelakaan hingga 50% pada tahun 2030.

Namun, ia melanjutkan, pencapaian target tersebut tidak dapat dilakukan secara sektoral, karena membutuhkan dukungan dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah pusat, daerah, hingga operator serta masyarakat.

Menurutnya operator angkutan memiliki peran penting dalam memastikan keselamatan di lapangan, mulai dari pemeriksaan kelaikan kendaraan hingga pengawasan terhadap kompetensi pengemudi sebelum beroperasi.

“Ini tantangan kita bersama untuk bagaimana merealisasikan target-target keselamatan yang sudah ditetapkan. Peran dan kontribusi masyarakat termasuk para operator yang setiap hari berada di lapangan sangat kami harapkan terutama untuk memastikan kendaraan yang dioperasikan benar-benar laik jalan dan pengemudinya memenuhi standar keselamatan,” tutupnya.



Rampcheck Bus Demi Keselamatan

Tingkatkan Keselamatan Perjalanan, Kemenhub Intensifkan *Rampcheck* Bus Selama Libur Sekolah 2026

Dalam rangka meningkatkan keselamatan perjalanan masyarakat selama masa libur sekolah tahun 2026, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan mengintensifkan pelaksanaan inspeksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan (*rampcheck*) terhadap bus yang beroperasi.

Guna mendukung hal tersebut, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menerbitkan Surat Edaran Nomor SE DRJD II Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pada Masa Libur Sekolah Tahun 2026.

Surat Edaran yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan Suhanan ini memuat pedoman pelaksanaan *rampcheck* pada masa libur sekolah 2026 untuk memastikan angkutan umum yang beroperasi memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

Ia menjelaskan, *rampcheck* penting dilakukan untuk meningkatkan keselamatan transportasi jalan sekaligus memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang melakukan perjalanan selama masa libur sekolah.

Dalam pelaksanaannya nanti, petugas akan memeriksa berbagai aspek keselamatan kendaraan, antara lain kondisi teknis kendaraan, kelengkapan persyaratan administratif, hingga dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Peraturan



”

“Keselamatan harus menjadi prioritas utama penyelenggaraan layanan transportasi jalan, terutama saat mobilitas masyarakat meningkat seperti masa libur sekolah, operator bus harus benar-benar memastikan armadanya dalam kondisi laik jalan. Kami turut mengimbau masyarakat memilih bus yang aman, masyarakat dapat mengecek status kendaraan melalui aplikasi Mitra Darat sebelum berpergian.”

Dalam pelaksanaannya nanti, petugas akan memeriksa berbagai aspek keselamatan kendaraan, antara lain kondisi teknis kendaraan, kelengkapan persyaratan administratif, hingga dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK.5637/AJ.403/DRJD/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Rampcheck dilaksanakan di sejumlah titik strategis di antaranya jalan tol dan jalan nasional non-tol; *rest area*; pintu keluar jalan tol; serta jalur alternatif pada tanggal 3-12 Juli 2026 dengan tetap memperhatikan kelancaran arus lalu lintas. Untuk mendukung efektivitas inspeksi, pelaksanaan *rampcheck* di luar terminal dan *pool* bus ini pun melibatkan instansi lain seperti kepolisian, Jasa Raharja, serta *stakeholder* lainnya.

Bus yang menjalani proses inspeksi dan ditemukan melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Sanksi dapat berupa tilang untuk pelanggaran administratif dan bus dilarang beroperasi sampai terpenuhinya persyaratan teknis utama ataupun penunjang.

Kemudian, Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan Suhanan mengimbau bagi seluruh operator angkutan umum untuk melakukan pemeriksaan kendaraan secara berkala, serta memenuhi semua aspek persyaratan administrasi dan laik jalan sehingga setiap armada yang dioperasikan dapat dipastikan dalam kondisi baik. Ia juga mengingatkan masyarakat untuk lebih cermat dalam memilih angkutan umum yang akan digunakan selama masa libur sekolah.

Ditjen Hubdat Perkuat Budaya Bersepeda Aman melalui KLIC FEST 2026

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan terus mendorong terwujudnya sistem transportasi yang aman, inklusif, dan berkelanjutan melalui penyelenggaraan *Klaten International Cycling Festival* (KLIC FEST) 2026 yang berlangsung pada 17–24 Mei 2026 di Jawa Tengah.

Kegiatan ini menjadi bagian dari penguatan Pekan Nasional Keselamatan Jalan (PNKU) melalui kampanye "Street for Life: Make Cycling Safe" yang mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menciptakan ruang jalan yang selamat bagi semua pengguna, khususnya pesepeda sebagai kelompok rentan.

KLIC FEST 2026 diselenggarakan sebagai sarana edukasi keselamatan transportasi sekaligus mendorong budaya bersepeda dan transportasi ramah lingkungan melalui kolaborasi pemerintah, akademisi, komunitas, serta mitra internasional. Selain meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keselamatan berlalu lintas, kegiatan ini juga memperkuat sinergi lintas sektor dalam mendukung mobilitas yang berkelanjutan.

Rangkaian kegiatan diawali dengan *The 35th International Cycling History Conference* (IHC) 2026 di Pendopo Kabupaten Klaten yang diikuti sekitar 200 peserta dari unsur pemerintah, akademisi, praktisi, komunitas sepeda, serta narasumber dari berbagai negara. Konferensi ini menjadi wadah pertukaran pengetahuan mengenai sejarah, budaya, inovasi, dan

pengembangan transportasi berbasis sepeda, termasuk pemanfaatan sepeda sebagai moda transportasi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Selanjutnya, *International Veteran Cycle Association* (IVCA) Rally ke-44 menghadirkan sekitar 120 peserta dari dalam dan luar negeri yang menempuh rute Candi Prambanan hingga Desa Kemudo. Sebelum memulai perjalanan, seluruh peserta mengikuti *safety briefing* sebagai bentuk penguatan budaya keselamatan bersepeda di jalan.

Selain mempromosikan keselamatan berlalu lintas, kegiatan ini juga memperkenalkan potensi budaya, pariwisata, dan produk unggulan lokal Kabupaten Klaten kepada masyarakat internasional.

Sebagai penutup, *Festival All Bike Classic Day-Out* (ABCD) di kawasan Candi Sewu menghadirkan berbagai kegiatan edukatif yang melibatkan masyarakat. Melalui pameran, penayangan iklan layanan masyarakat, *talkshow* bertema "Bergerak Bijak, Melaju Berkeselamatan", permainan edukasi, hingga pembagian media kampanye keselamatan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mengajak masyarakat untuk membangun budaya berlalu lintas yang aman sejak usia dini.

Melalui KLIC FEST 2026, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menegaskan komitmennya dalam memperkuat budaya keselamatan jalan sekaligus mendorong penggunaan transportasi yang lebih berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah, komunitas, akademisi, dunia internasional, dan masyarakat diharapkan mampu menciptakan ekosistem transportasi yang lebih aman, ramah lingkungan, serta mendukung kualitas hidup masyarakat di masa depan.



Libur Panjang Kenaikan Yesus Kristus, Kemenhub Lakukan Rampcheck 55 Armada Bus

Selama masa libur panjang Hari Kenaikan Yesus Kristus, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan melakukan inspeksi keselamatan lalu lintas angkutan jalan (*rampcheck*) terhadap 55 armada bus di Rest Area KM 45 Tol Jagorawi, Kab. Bogor, Jawa Barat pada 14-15 Mei 2026.



Pengawasan yang dilakukan meliputi pemeriksaan kelengkapan dokumen administrasi seperti perizinan operasional kendaraan (KPS), uji berkala (KIR), kepatuhan terhadap trayek, kelengkapan administrasi pengemudi, serta pemenuhan aspek keselamatan seperti kondisi teknis kendaraan hingga kesiapan pengemudi.

Adapun pelanggaran yang ditemukan yakni, empat kendaraan dengan masa uji berkala (KIR) yang sudah habis, tiga kendaraan yang tidak memiliki KIR, dan satu kendaraan terindikasi memiliki KIR palsu. Kemudian, sebanyak tujuh kendaraan memiliki KPS yang sudah tidak berlaku, enam kendaraan tidak mempunyai KPS, satu kendaraan terindikasi mempunyai KPS palsu, dua kendaraan melakukan penyimpangan trayek.

Diharapkan para operator dan pengemudi untuk mematuhi ketentuan yang berlaku, memastikan kelaikan armadanya sebelum beroperasi serta memastikan kondisi pengemudi dalam keadaan sehat dan prima.

Jelang Libur Idul Adha, Kemenhub Imbau Operator dan Masyarakat Utamakan Keselamatan Berlalu Lintas

Penting bagi masyarakat untuk betul-betul mempersiapkan perjalanan jika bepergian menggunakan kendaraan pribadi, dengan melakukan perawatan berkala di bengkel terpercaya guna memastikan kendaraan dalam kondisi laik jalan.

Pada masa libur panjang Idul Adha tahun ini, ada peningkatan mobilitas masyarakat di ruas jalan dan simpul transportasi. Puncak arus pergi jatuh pada 26 Mei dan puncak arus balik pada 1 Juni, sehingga Kementerian Perhubungan terus melakukan berbagai upaya untuk menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas terutama selama periode libur panjang melalui koordinasi lintas kementerian/lembaga, menyiapkan personel di titik vital, peningkatan pengawasan hingga edukasi kepada masyarakat.

Selain mengimbau masyarakat untuk mengutamakan keselamatan, Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan Suhanan juga menekankan pentingnya sinergi dan koordinasi antar *stakeholder* dalam menghadapi peningkatan mobilitas selama libur Idul Adha. Ia menyampaikan bahwa Korlantas Polri telah menyiapkan personel untuk manajemen operasional lalu lintas dan Ditjen Bina Marga KemenPU bersama BUJT telah memastikan kemandirian ruas jalan tol dan non-tol, mengoptimalkan layanan patroli, gerbang tol, CCTV, hingga *rest area*.



DIHARAPKAN DAPAT MENGURANGI POTENSI KECELAKAAN LALU LINTAS SERTA MENINGKATKAN PERLINDUNGAN TERHADAP PENGGUNA JALAN.

Periode:
1 Januari–3 April 2026

Kemenhub Periksa Kelaikan Lebih Dari 900 Ribu Kali Perjalanan Bus



Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan terus meningkatkan segala aspek keselamatan pada angkutan orang, dengan melakukan inspeksi keselamatan (*rampcheck*) pada armada bus di Terminal Tipe A (TTA) seluruh Indonesia. Inspeksi keselamatan ini dilakukan dengan memanfaatkan aplikasi *Terminal Online System* (TOS).

Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan Suhanan mengungkapkan, pada pengawasan dan pemeriksaan periode 1 Januari s/d 3 April 2026, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat telah memeriksa 963.859 kali perjalanan yang berangkat di 115 lokasi TTA. Hasil pemeriksaan tersebut, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menemukan 576.280 kali perjalanan (59,78%) yang melakukan pelanggaran sementara 387.576 kali perjalanan (40,21%) dinyatakan tidak melanggar.

"Jenis pelanggarannya beragam, mulai dari penyimpangan trayek, bukti lulus uji atau BLUe kedaluwarsa dan KPS yang juga sudah lewat masa berlaku," ungkapnya di

Jakarta, pada Minggu (5/4).

Adapun rincian pelanggaran yang ditemukan pada bus yang berangkat dari 115 lokasi TTA meliputi 325.913 pelanggaran penyimpangan trayek, kemudian 154.236 pelanggaran masa berlaku bukti lulus uji, serta 278.179 pelanggaran masa berlaku kartu pengawasan (KPS) atau surat izin penyelenggaraan angkutan orang.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan Suhanan juga menyampaikan rekapitulasi pemeriksaan pada angkutan orang yang datang di 115 lokasi TTA pada periode 1 Januari s/d 3 April 2026, dengan total bus yang sudah diperiksa mencapai 993.155 kali perjalanan. Hasil pemeriksaan menunjukkan 401.981 kali perjalanan (40,48%) tidak melakukan pelanggaran sedangkan 591.174 kali perjalanan (59,52%) dinyatakan melanggar.

"Masih banyak ditemukan pelanggaran pada angkutan orang yang datang di terminal sehingga tidak dinyatakan laik jalan. Kami sudah melakukan *rampcheck* pada lebih dari 900 ribu kali perjalanan bus yang datang di terminal dan ada lebih dari 500 ribu atau sekitar 59% di antaranya yang dinyatakan melakukan pelanggaran," tuturnya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan pada bus yang melanggar ditemukan beberapa pelanggaran di antaranya 324.131 pelanggaran penyimpangan trayek, 168.031

pelanggaran masa berlaku bukti lulus uji, dan 296.140 pelanggaran masa berlaku KPS.

"Kami juga sudah mencatat dan melakukan penindakan pada lima perusahaan otobus (PO) yang paling banyak melakukan pelanggaran, ada PT SSR, PT EMPS, PT BDM, PT PP, dan PT SJML. Kami pun sudah meminta klarifikasi dari kelima operator ini terkait pelanggaran yang ditemukan pada unit kendaraan mereka," ucapnya.

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat akan menjadikan hasil pengawasan dan pemeriksaan ini sebagai bahan evaluasi dan ke depannya akan secara konsisten memperkuat pengawasan terhadap angkutan orang demi keselamatan masyarakat dan kelancaran lalu lintas. Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan Suhanan berharap seluruh operator angkutan orang mematuhi semua ketentuan yang berlaku demi keselamatan dan kenyamanan para penumpang.

"Prinsip kami keselamatan adalah prioritas untuk itu kami imbau kepada seluruh operator bus dan pengemudi untuk mengoperasikan armada yang laik jalan. Pastikan selalu bawa dokumen resmi kelengkapan kendaraan yang masih berlaku, pastikan juga pengemudi dalam kondisi sehat dan selalu utamakan keselamatan serta kenyamanan untuk penumpang," pungkasnya.

Ditjen Hubdat Panggil Green SM Imbas Kecelakaan KRL Cikarang dan KA Argo Bromo Anggrek

Sebagai tindak lanjut atas kejadian kecelakaan KRL Cikarang dengan KA Argo Bromo Anggrek, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat telah memanggil manajemen Xanh SM atau Green SM pada Selasa (28/4) untuk klarifikasi pasca kecelakaan.

Berdasarkan data di aplikasi Siprajab, kendaraan taksi yang terlibat kecelakaan bernomor polisi B 2864 SBX dan tercatat telah terdaftar serta memiliki kartu pengawasan yang berlaku hingga 28 Oktober 2026. Kendaraan taksi tersebut pun terdaftar untuk melakukan pelayanan taksi reguler di wilayah Jabodetabek.

Walau demikian, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat tetap melakukan pendalaman lebih lanjut untuk memastikan kepatuhan operator terhadap seluruh ketentuan yang berlaku. Diketahui juga, perusahaan taksi Green SM telah memiliki sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (SMK PAU) yang berlaku selama lima tahun.

Namun, Kementerian Perhubungan tetap melakukan klarifikasi, pendalaman, serta penindakan apabila terbukti ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum dan PM 117 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek.

Kementerian Perhubungan telah membentuk tim khusus untuk mendalami keterlibatan taksi Xanh SM termasuk dalam sisi perizinannya, kelengkapan administrasi, pemenuhan standar keselamatan, hingga kepatuhan pada ketentuan operasional angkutan umum.

"Kami akan melihat apabila terdapat pelanggaran terhadap ketentuan operasional angkutan umum, maka sanksi administrasi akan diberikan secara proposional sesuai aturan yang ada," tutup Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan Suhanan.

KAMI AKAN MENGAUDIT KEMBALI ELEMEN-ELEMEN STANDAR MANAJEMEN KESELAMATAN YANG WAJIB DIPENUHI OLEH PERUSAHAAN ANGKUTAN UMUM.

JADI KAMI AKAN MELIHAT KEMBALI BAGAIMANA STANDAR MANAJEMEN KESELAMATAN YANG TELAH DIJALANKAN DI LAPANGAN OLEH PERUSAHAAN INI, TERMASUK JUGA KEWAJIBAN PERUSAHAAN DALAM MEMASTIKAN KENDARAAN, PENGEMUDI, DAN SEMUA SISTEM OPERASIONALNYA MEMENUHI ASPEK KESELAMATAN.



Pastikan Sistem Keselamatan Berjalan, Dirjen Hubdat Sidak Pool Green SM Bekasi

Kegiatan pada (28/4) dilakukan di *pool* Green SM Bekasi karena merupakan lokasi asal dari operasional kendaraan yang diduga terlibat kecelakaan. Inspeksi yang dilaksanakan berfokus pada pemeriksaan kelengkapan administrasi, kelaikan kendaraan, kesiapan operasional armada, serta elemen-elemen keselamatan lainnya.

"Kami ingin memastikan sistem manajemen keselamatan di perusahaan angkutan umum, termasuk Green SM, telah dilaksanakan sesuai ketentuan. Dari hasil pemeriksaan awal, terdapat beberapa temuan yang akan kami dalam lebih lanjut," ujar Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan Suhanan.

Pendalaman lanjutan dilakukan di *pool* pusat Green SM di Kemayoran, Jakarta, untuk memperoleh kesimpulan menyeluruh. Selain itu, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan KNKT terkait dugaan keterlibatan kendaraan dalam peristiwa kecelakaan KRL Cikarang dengan KA Argo Bromo Anggrek.

Direktur Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan, Yusuf Nugroho yang memimpin inspeksi mengatakan sidak ini merupakan bagian dari pengawasan terhadap pelaksanaan SMK PAU yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan PM Nomor 85 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum.

"Dalam hal terjadinya insiden, Ditjen Perhubungan Darat dapat melakukan audit dan inspeksi melalui pengamatan dan pemantauan. Bahwa dalam kondisi tertentu seperti kecelakaan lalu lintas yang menonjol atau berulang, Ditjen Perhubungan Darat dapat melakukan audit dan inspeksi untuk memastikan aspek keselamatan," ungkapnya.

Kemenhub Perkuat Implementasi Zero ODOL 2027

Dengan Penanganan Dari Hulu ke Hilir

Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan Suhanan menegaskan, untuk mewujudkan *Zero Kenndaraan ODOL 2027*, tidak bisa lagi ditangani secara parsial, melainkan perlu ditangani secara menyeluruh dari hulu ke hilir.

Di sisi pengawasan, menurutnya pengawasan harus dimulai dari titik pemuatan barang, lalu diperkuat dengan deteksi digital di jalan, integrasi data, dan penegakan hukum sehingga semua pihak yang terlibat dalam proses distribusi logistik juga terawasi dan patuh dengan ketentuan yang ada.

Oleh karena itu, dengan adanya rencana aksi yang menyeluruh serta kolaborasi antar semua kementerian, lembaga, hingga *stakeholder* yang terlibat dalam ekosistem angkutan logistik, Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan Suhanan pun optimistis target *Zero kendaraan ODOL* pada tahun 2027 dapat direalisasikan.

“Penanganannya harus menyeluruh dari hulu ke hilir sehingga pendekatannya bukan sekadar menindak tetapi menata ekosistemnya. Dengan *roadmap* dan sistem yang sedang kami bangun, nantinya tanggung jawab tidak hanya dibebankan ke pengemudi, tapi juga operator atau pemilik barang juga diminta pertanggungjawaban hukumnya,”

Kemenhub Dorong Transformasi Pengawasan Digital Kendaraan ODOL

Kementerian Perhubungan bersama kementerian dan lembaga lain seperti Korlantas Polri, Kementerian PU, BUJT, Kementerian Perindustrian hingga Kementerian Perdagangan tengah melakukan transformasi pengawasan berbasis digital melalui integrasi data lintas *stakeholders*. Transformasi dilakukan dengan memanfaatkan teknologi seperti kamera ETL E ataupun jembatan timbang *Weigh in Motion* (WIM) guna mempermudah proses pengawasan hingga penegakan hukum terhadap kendaraan lebih dimensi dan lebih muatan.

“Saat ini pengawasan masih parsial dan konvensional, personil kami terbatas dan harus mengawasi sekian banyak kendaraan ODOL. Artinya kita perlu melakukan pengawasan berbasis teknologi dan data secara digital karena manual tidak bisa lagi, kami akan maksimalkan pemanfaatan data yang ada di kementerian dan lembaga lainnya,” jelas Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan Suhanan di Jakarta, Senin (13/4).

Sistem pengawasan berbasis digital juga mampu mencegah terjadinya pungutan liar (pungli) karena akan mengurangi interaksi antara petugas dengan pengemudi di lapangan. “Terkait pungli kita tidak menutup mata masih terjadi dan kami tegas terhadap pelanggaran tersebut, sudah ada yang kita demosi tidak kerja di jembatan timbang lagi. Kita pun melihat ini sebagai tantangan untuk terus mengawasi personil kita agar tidak melakukan pungli, makanya dengan adanya sistem digital seperti CCTV atau ETL E akan menutup ruang terjadinya tawar-menawar pengemudi dengan petugas jadi menutup ruang adanya pungli,” ujarnya.

“Dengan orkestrasi yang dipimpin Kemenko Infrawil dan komitmen yang sama dari semua kementerian dan lembaga, saya optimistis 2027 *Zero Over Dimension Over Load* dapat tercapai.

Mari kita akhiri toleransi terhadap kendaraan *over dimension* dan *over load*, juga terhadap kecelakaan lalu lintas karena tidak ada yang lebih penting dari keselamatan manusia, satu nyawa terlalu banyak,”

TAHUKAH KAMU?

Mengapa Bersepeda & Berjalar



Ketika berbicara tentang transportasi, yang sering terlintas di benak kita adalah kendaraan bermotor seperti mobil, sepeda motor, bus, atau kereta api. Padahal, perjalanan seseorang hampir selalu diawali dan diakhiri dengan berjalan kaki. Bahkan, bagi sebagian masyarakat, sepeda menjadi moda transportasi yang efektif untuk menempuh jarak pendek hingga menengah.

Inilah mengapa berjalan kaki dan bersepeda tidak hanya dipandang sebagai aktivitas fisik atau rekreasi, tetapi juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem transportasi.

Dalam konsep transportasi modern, berjalan kaki dan bersepeda termasuk ke dalam transportasi aktif (*active mobility*). Moda ini berperan sebagai penghubung antar-moda, misalnya dari rumah menuju halte bus, terminal, stasiun, atau pelabuhan. Tanpa adanya akses pejalan kaki dan jalur sepeda yang aman, kenyamanan masyarakat dalam menggunakan transportasi umum pun akan berkurang.

Mendorong masyarakat untuk berjalan kaki atau bersepeda juga memberikan berbagai manfaat. Selain mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi, kedua moda ini mampu membantu mengurangi kemacetan, menekan emisi gas buang, serta menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih sehat dan ramah bagi semua pengguna jalan.

an Kaki

Menjadi Bagian dari Sistem Transportasi?

Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan terus mendukung pengembangan sistem transportasi yang terintegrasi, termasuk penyediaan fasilitas bagi pejalan kaki dan pesepeda. Trotoar yang nyaman, jalur sepeda yang aman, penyeberangan yang memadai, hingga konektivitas menuju simpul transportasi merupakan bagian penting dalam membangun ekosistem transportasi yang berkeselamatan dan berkelanjutan.

Dari sisi keselamatan, pejalan kaki dan pesepeda termasuk kelompok pengguna jalan yang rentan. Oleh karena itu, penyediaan infrastruktur yang layak serta meningkatnya kesadaran seluruh pengguna jalan untuk saling menghormati menjadi faktor penting dalam menciptakan ruang jalan yang aman bagi semua.

Di berbagai kota, integrasi antara transportasi aktif dengan angkutan umum juga mulai menunjukkan hasil yang positif. Masyarakat dapat berjalan kaki atau bersepeda menuju halte *Bus Rapid Transit* (BRT), terminal, maupun stasiun, kemudian melanjutkan perjalanan menggunakan angkutan umum. Pola perjalanan seperti ini tidak hanya lebih efisien, tetapi juga mendukung terciptanya sistem transportasi yang lebih ramah lingkungan.

Pada akhirnya, sistem transportasi yang baik bukan hanya tentang seberapa cepat kendaraan dapat bergerak, melainkan juga tentang bagaimana setiap orang dapat berpindah dengan aman, nyaman, mudah dijangkau, dan berkelanjutan. Karena itu, setiap langkah kaki dan setiap kayuhan sepeda memiliki peran penting dalam mewujudkan transportasi Indonesia yang semakin terintegrasi dan berorientasi pada keselamatan.



5 Alasan Kita Perlu Beralih ke Transportasi Hijau



Mari Mulai dari Hal Kecil

Transportasi hijau bukan hanya pilihan, tapi kebutuhan untuk masa depan yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan



1

MENGURANGI DALAM KETERGANTUNGAN PADA BAHAN BAKAR FOSIL

Penggunaan transportasi hijau membantu menekan konsumsi BBM yang sedang menjadi isul global.



2

MENURUNKAN EMISI KARBON

Transportasi ramah lingkungan, seperti kendaraan listrik atau transportasi umum, berkontribusi dalam mengurangi karbon yang menjadi penyebab utama pada perubahan iklim.



3

MENGURANGI POLUSI UDARA

Beralih ke transportasi publik dapat membantu menekan polusi udara dan menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih sehat.



4

MENDUKUNG UPAYA DALAM MENGATASI PEMANASAN GLOBAL

Dengan berkurangnya emisi gas rumah kaca, transportasi hijau berperan penting dalam memperlambat laju pemanasan global.



5

MENINGKATKAN KUALITAS DAYA HIDUP PADA MASYARAKAT PERKOTAAN

Lingkungan yang lebih bersih, udara yang lebih sehat, serta tingkat kebisingan yang lebih rendah akan menciptakan kualitas hidup yang lebih baik bagi masyarakat.

Evaluasi Angkutan Lebaran di Bali

Kemenhub Dorong Optimalisasi
Buffer Zone dan Pelabuhan Alternatif



Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan, Aan Suhanan telah melakukan evaluasi penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2026, khususnya pada penyelenggaraan di wilayah Bali sebagai upaya peningkatan layanan transportasi ke depannya.

Ia menyampaikan, kepadatan yang sempat terjadi di jalan menuju Pelabuhan Gilimanuk saat periode mudik Lebaran 2026 menjadi pelajaran penting untuk segera dicarikan solusinya. Hal ini terutama dalam pengelolaan transportasi di simpul penyeberangan yang memiliki keterbatasan kapasitas menampung kendaraan.

“Ada pengelolaan awal yang kurang maksimal salah satunya pemanfaatan *buffer zone*, padahal pengelolaannya jadi salah satu kunci untuk mengatur kendaraan yang berangkat ke pelabuhan. Pelabuhan mana pun harus ada *buffer zone*, karena sifat pelabuhan terbatas menampung kendaraan, jadi harus berkolaborasi dengan seluruh *stakeholder* untuk kita perbaiki bersama,” terang Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan Suhanan saat kunjungan kerja di Terminal Tipe A Mengwi, Bali, Jumat (17/4).

Ia menilai agar masalah tersebut tidak terulang lagi, dan mendorong pencarian lokasi *buffer zone* lainnya sebelum menuju Pelabuhan Gilimanuk untuk mendukung sistem pengaturan kendaraan. Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan Suhanan juga berharap, pemerintah daerah bisa bekerja sama dalam menyediakan lahan

untuk dijadikan kantong parkir (*buffer zone*) di lokasi yang tidak jauh dari Pelabuhan Gilimanuk.

Selain mengatur *buffer zone*, perlu juga menyediakan pelabuhan alternatif di Bali, untuk mengurangi ketergantungan dan beban berlebih di lintas Ketapang–Gilimanuk, seperti yang sudah diterapkan di lintas Merak–Bakauheni. Salah satu pelabuhan yang dapat dijadikan alternatif adalah Celukan Bawang untuk membantu mengurangi kepadatan saat terjadi lonjakan *volume* kendaraan di Gilimanuk.

Selain itu, peningkatan kapasitas angkut kapal juga menjadi perhatian Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Koordinasi dengan operator penyeberangan terus dilakukan agar kapal dengan kapasitas lebih besar dapat dioperasikan di lintasan Ketapang–Gilimanuk, sehingga pergerakan kendaraan yang menyeberang bisa lebih cepat dan antrian dapat diminimalisir.

Seluruh langkah ini ditargetkan menjadi solusi dalam menghadapi periode angkutan Natal dan Tahun Baru serta Lebaran di tahun-tahun berikutnya. Sehingga simpul transportasi di Bali bisa berfungsi lebih optimal dan pengelolaan lalu lintas serta penyeberangan dapat berjalan lebih efektif.

“Kita ingin ke depan perjalanan masyarakat dan distribusi logistik di Bali bisa lebih lancar, aman, dan terkelola dengan baik. Oleh karena itu, butuh koordinasi dan kerja sama semua pihak untuk merealisasikannya,” pungkasnya.

Komitmen Pelayanan Publik Berkualitas

Ditjen Hubdat Perkuat Pelayanan Publik Melalui Pencanangan Pembangunan Zona Integritas

Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan melaksanakan kegiatan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta, pada Senin (25/5).

Kegiatan ini merupakan langkah awal dalam akselerasi mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dalam memberikan pelayanan publik. Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan Suhanan menyampaikan, kegiatan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas merupakan ikrar dan komitmen bersama untuk melakukan reformasi yang nyata, menyeluruh, dan berkelanjutan di sektor Perhubungan Darat. Menurut Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan Suhanan reformasi ini diperlukan untuk memperbaiki kualitas pelayanan dan untuk memenuhi kebutuhan publik.

"Masyarakat menginginkan pelayanan yang cepat, transparan, akuntabel, mudah diakses, dan bebas dari praktik penyimpangan. Oleh karena itu, kita tidak boleh terjebak dalam pola kerja lama yang lambat dan kaku, kita harus menjadi organisasi yang adaptif, responsif, dan lincah dalam menjawab kebutuhan publik," jelasnya.

Pembangunan zona integritas harus dilaksanakan secara serentak, menyeluruh, dan konsisten di semua satuan unit kerja lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Pimpinan di seluruh unit kerja harus menjadi teladan dan pendorong perubahan *mindset* dan *culture-set* aparatur, dari mentalitas ingin dilayani menjadi siap melayani, serta secara konsisten menjaga integritas dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Selain meningkatkan kualitas pelayanan, penegakan hukum di satuan pelayanan harus dilaksanakan secara bersih, tegas, dan berwibawa. Ia mengungkapkan, saat ini masih terdapat keluhan dari masyarakat terkait praktik transaksional, karena itu penting bagi setiap satuan pelayanan untuk melakukan evaluasi agar tidak ada penyalahgunaan wewenang.

"Saya garis bawahi, tidak boleh ada ruang bagi praktik transaksional dan penyalahgunaan wewenang. Secara faktual masih ada keluhan-keluhan dari masyarakat terkait pelayanan, jadi tolong dikoreksi dan dievaluasi pelayanan yang diberikan di semua unit pelayanan," ucapnya.

Reformasi pelayanan dan pengawasan juga perlu didigitalisasi melalui penguatan integrasi sistem data dan pengendalian internal yang ketat sehingga bisa menyederhanakan birokrasi serta mempercepat pelayanan kepada publik. Ia menambahkan, peran satuan penjamin mutu dan pengawasan internal harus dioptimalkan agar pengawasan dapat dilakukan secara *real-time* dan berkelanjutan.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan Suhanan turut menyampaikan terkait arah kebijakan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat harus berorientasi pada upaya meningkatkan keselamatan masyarakat. Oleh karena itu, setiap unit kerja harus memiliki target kinerja keselamatan yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Adapun dalam kegiatan ini dilakukan penandatanganan piagam: Pencanangan Pembangunan Zona Integritas; Pernyataan Komitmen Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat; dan Deklarasi Anti Pungutan Liar di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Kemudian, juga dilakukan pemberian penghargaan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Tahun 2025 kepada Terminal Tipe A Patria Blitar, BPTD Kelas II Jawa Timur dan pemberian penghargaan atas Penilaian Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI kepada Direktorat Angkutan Jalan dan Direktorat Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan, serta *sharing session*.

Turut hadir pada kegiatan Pencanangan Zona Integritas: Inspektur Jenderal Kemenhub, Djarot Tri Wardhono; Sekretaris Jenderal Kemenhub, Arif Toha; Sesditjen Perhubungan Darat, Ernita Titis Dewi; Sekretaris Deputi Bid. Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur & Pengawasan, Nurhasni sebagai pemateri pada *sharing session*; Analis Kebijakan Ahli Utama KemenPAN-RB sebagai pemateri pada *sharing session*.

“Keselamatan transportasi jalan ini harus menjadi prioritas utama, setiap kebijakan program harus berorientasi pada upaya menurunkan angka kecelakaan dan meningkatkan keselamatan masyarakat. Kegiatan pengawasan harus dilaksanakan secara profesional, transparan, dan sesuai dengan SOP yang sudah ada dan tetap utamakan integritas karena integritas pegawai adalah harga mati.”.

AAN SUHANAN,
Direktur Jenderal Perhubungan Darat



Transit Oriented Development dalam
Konteks Perkotaan Indonesia

Integrasi Transportasi Massal sebagai Strategi Reformasi Tata Kota

oleh

Ir. Andi Putra Jaya, S.SiT., M.Sc., IPM., ASEAN Eng., QRMP.

Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda, Kementerian Perhubungan



Urbanisasi yang pesat telah menjadikan kota-kota besar di Indonesia sebagai bagian dari pusat pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus menghadirkan berbagai tantangan struktural dalam pengelolaan transportasi serta tata ruang di perkotaan. Pertumbuhan aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat tidak selalu diimbangi dengan sistem transportasi yang terintegrasi dengan perencanaan tata ruang, sehingga menimbulkan berbagai permasalahan seperti kemacetan lalu lintas, perjalanan harian jarak jauh, meningkatnya ketergantungan terhadap kendaraan pribadi.

Dalam satu dekade terakhir, pemerintah telah mendorong pengembangan transportasi massal di berbagai kawasan metropolitan melalui pembangunan sistem MRT, LRT dan BRT. Investasi ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat peran angkutan umum sebagai tulang punggung mobilitas perkotaan. Namun demikian, peningkatan kapasitas transportasi massal tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh perubahan struktur ruang kota maupun perilaku mobilitas masyarakat.

Salah satu penyebab utama kondisi tersebut adalah terpisahnya perencanaan transportasi dan pengembangan kawasan di perkotaan. Transportasi massal sering diposisikan sebagai proyek infrastruktur semata tanpa diikuti pengembangan kawasan yang

mampu mendukung aktivitas dan permintaan perjalanan di sekitar simpul transit. Akibatnya, banyak kawasan transit yang belum berkembang sebagai pusat aktivitas perkotaan yang terintegrasi dan ramah bagi pengguna transportasi publik.

Pada konteks tersebut, pendekatan *Transit Oriented Development* (TOD) menjadi semakin relevan untuk mendorong integrasi antara transportasi massal dan tata ruang perkotaan. TOD menekankan pengembangan kawasan dengan kepadatan yang lebih tinggi, fungsi lahan campuran, serta lingkungan yang mendukung mobilitas berjalan kaki dan bersepeda di sekitar simpul transit.

Melalui pendekatan ini, transportasi massal tidak hanya berfungsi sebagai infrastruktur mobilitas,

berjalan kaki dan bersepeda di sekitar simpul transit.

Melalui pendekatan ini, transportasi massal tidak hanya berfungsi sebagai infrastruktur mobilitas, tetapi juga sebagai penggerak utama dalam pembentukan struktur

lebih mudah dilakukan dengan kendaraan pribadi dibandingkan dengan angkutan umum yang jangkauannya terbatas atau tidak terintegrasi secara optimal.

Di sisi lain, pembangunan transportasi massal yang dilakukan pemerintah

Membangun transportasi bukan hanya menghadirkan moda tetapi juga membentuk kota yang lebih layak huni bagi semua.

kota yang lebih kompak, efisien, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, kajian mengenai implementasi TOD penting dilakukan sebagai dasar perumusan kebijakan transportasi dan tata ruang yang lebih terintegrasi di Indonesia.

Mewujudkan Kota Berorientasi Transit

Kinerja transportasi perkotaan di kota-kota besar Indonesia masih ditandai oleh tingginya ketergantungan terhadap kendaraan pribadi, khususnya sepeda motor dan mobil. Berbagai studi mobilitas perkotaan menunjukkan bahwa pangsa penggunaan angkutan umum di banyak kota besar masih *relative* rendah jika dibandingkan kendaraan pribadi. Di kawasan metropolitan seperti Jakarta dan kota besar lainnya, kendaraan pribadi masih banyak mendominasi perjalanan harian masyarakat, yang berdampak pada meningkatnya kemacetan lalu lintas, waktu tempuh perjalanan, serta biaya ekonomi akibat inefisiensi transportasi perkotaan.

Permasalahan tersebut tidak terlepas dari struktur tata ruang perkotaan yang berkembang secara terfragmentasi. Pola pengembangan kota yang memisahkan kawasan hunian, pusat kegiatan ekonomi, serta fasilitas pelayanan publik telah menciptakan jarak perjalanan yang semakin Panjang. Di banyak kota besar, kawasan permukiman berkembang pesat di wilayah pinggiran, sementara pusat kegiatan ekonomi tetap terkonsentrasi di pusat kota atau koridor tertentu. Kondisi ini dapat menyebabkan masyarakat harus melakukan perjalanan lintas wilayah setiap hari, yang dalam praktiknya

dalam satu dekade terakhir seperti MRT, LRT, dan BRT belum sepenuhnya diikuti pengembangan kawasan yang terintegrasi dengan simpul transit. Banyak simpul transportasi massal masih berada di kawasan dengan kepadatan rendah, fungsi lahan tunggal serta lingkungan yang kurang mendukung mobilitas pejalan kaki maupun pesepeda. Akibatnya, potensi peningkatan jumlah pengguna transportasi massal tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Dengan tidak sinkronnya antara pembangunan transportasi dan tata ruang juga mendorong terjadinya *urban sprawl* yaitu perluasan kota ke wilayah pinggiran yang tidak terencana secara terpadu. Fenomena ini dapat meningkatkan kebutuhan penyediaan infrastruktur jalan, utilitas, dan layanan publik dengan biaya yang semakin tinggi, sekaligus memperbesar jarak serta waktu tempuh perjalanan harian masyarakat. Permasalahan tersebut semakin diperkuat oleh belum adanya kerangka implementasi *Transit Oriented Development* (TOD) yang konsisten secara nasional. Meskipun konsep TOD telah mulai diadopsi dalam berbagai dokumen kebijakan dan perencanaan pembangunan, implementasinya di lapangan masih bersifat parsial dan belum didukung dengan koordinasi kelembagaan, regulasi tata ruang, serta skema pembiayaan yang terintegrasi. Tanpa integrasi yang kuat antara transportasi massal dengan pengembangan kawasan perkotaan, investasi transportasi yang besar berisiko tidak menghasilkan manfaat optimal dalam meningkatkan mobilitas perkotaan yang efisien dan berkelanjutan

Kebijakan yang Disasar

1. UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
2. UU Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;
3. UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
5. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Nasional (RITN);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kereta Api;
8. Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Berorientasi Transit;
9. Peraturan Kepala Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi Nomor PR.377/A.J.208 BPTJ-2017 tentang Pedoman Teknis Aspek Transportasi Dalam Penyelenggaraan Pengembangan Kawasan Berorientasi Angkutan Umum Massal di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Meskipun kerangka regulasi transportasi dan penataan ruang telah tersedia, implementasi integrasi transportasi dan tata ruang masih menghadapi tantangan koordinasi lintas sektor dan pemerintah daerah.

Rekomendasi Kebijakan

Pengembangan Kawasan Berorientasi Transit (*Transit Oriented Development*/TOD) perlu ditempatkan sebagai bagian integral dari kebijakan transportasi perkotaan dan penataan ruang, bukan hanya sebagai konsep pengembangan kawasan di sekitar simpul transit. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas investasi transportasi massal sekaligus membentuk struktur kota yang kompak, efisien dan berkelanjutan. Berdasarkan analisis terhadap alternatif kebijakan, terdapat tiga intervensi utama yang dapat dilakukan untuk memperkuat implementasi TOD di Indonesia.

Pertama, penguatan integrasi antarmoda pada kawasan transit. Pemerintah perlu memastikan konektivitas fisik dan operasional antara moda transportasi massal dengan moda pengumpan melalui penyediaan jaringan pejalan kaki yang aman, nyaman, dan inklusif dengan jarak tiap perpindahan antarmoda ideal tidak melebihi 400 meter. Integrasi ini juga perlu didukung oleh sinkronisasi jadwal layanan antarmoda serta penyediaan sistem tiket terintegrasi guna mempermudah perpindahan perjalanan.

Penguatan integrasi antarmoda diharapkan mampu meningkatkan kenyamanan perjalanan multimoda dan mendorong peningkatan penggunaan angkutan umum. alternatif ini diharapkan mampu menurunkan waktu dalam perpindahan antarmoda sekurang-kurangnya 20% dan meningkatkan proporsi perjalanan multimoda hingga 15%. Meskipun relatif cepat diimplementasikan dan berdampak langsung terhadap kenyamanan pengguna, efektivitas kebijakan ini cenderung terbatas apabila tidak didukung oleh pengendalian pemanfaatan ruang di sekitar simpul transit.

Kedua, pengendalian tata guna lahan berbasis aksesibilitas transportasi. Pengembangan kawasan di sekitar simpul transit perlu diarahkan melalui peningkatan intensitas pemanfaatan ruang, penerapan fungsi lahan campuran (*mixed-use development*), serta pembatasan penyediaan parkir kendaraan pribadi pada zona inti TOD. Kebijakan ini bertujuan menciptakan kepadatan aktivitas yang mendukung perjalanan jarak pendek dan meningkatkan aksesibilitas terhadap transportasi publik dalam radius berjalan kaki dari simpul transit. Secara terukur, alternatif ini berpotensi menurunkan penggunaan kendaraan pribadi hingga 10% serta dapat meningkatkan indeks aksesibilitas kawasan dalam radius 800 meter dari simpul transit. Namun demikian, kebijakan ini memerlukan koordinasi lintas sektor yang kuat dan kesiapan pemerintah daerah dalam mengintegrasikan prinsip TOD ke dalam dokumen RTRW dan RDTR.

Ketiga, penerapan manajemen permintaan transportasi secara selektif pada kawasan TOD. Kebijakan ini dapat dilakukan melalui pengaturan tarif parkir progresif, prioritas ruang jalan bagi angkutan umum, serta penerapan kebijakan pengendalian lalu lintas seperti kawasan rendah emisi atau pengelolaan akses kendaraan pribadi pada kawasan tertentu. Kebijakan ini berfungsi untuk mengendalikan penggunaan kendaraan pribadi sekaligus meningkatkan daya tarik transportasi publik. Alternatif ini efektif dalam menekan penggunaan kendaraan pribadi dan meningkatkan kinerja operasional angkutan umum. Namun, kebijakan ini berisiko menimbulkan resistensi publik apabila tidak disertai peningkatan kualitas layanan transportasi publik yang memadai.

Pemilihan alternatif kebijakan dilakukan dengan menggunakan pendekatan multi-kriteria yang mempertimbangkan dampak terhadap peningkatan penggunaan angkutan umum, kelayakan implementasi, kebutuhan investasi, keberlanjutan jangka panjang, serta tingkat penerimaan publik. Berdasarkan analisis tersebut, kombinasi antara penguatan integrasi antarmoda dan pengendalian tata guna lahan berbasis aksesibilitas transportasi dipandang sebagai pendekatan yang paling efektif dalam tahap awal implementasi TOD di Indonesia. Pendekatan ini mampu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kualitas layanan transportasi sekaligus membentuk struktur kawasan yang mendukung pergeseran moda secara berkelanjutan.

Dengan demikian, kebijakan pengembangan TOD direkomendasikan untuk dilaksanakan secara bertahap, dimulai dari standarisasi integrasi fisik dan operasional antarmoda pada simpul transit prioritas, dilanjutkan dengan integrasi prinsip TOD ke dalam kebijakan tata ruang dan perizinan, serta didukung oleh penerapan manajemen permintaan transportasi secara selektif pada kawasan yang telah matang. Implementasi kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan pangsa angkutan umum, mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi, serta memperkuat peran TOD sebagai simpul mobilitas.

Integrasi antara transportasi massal dan tata ruang perkotaan merupakan salah satu prasyarat utama dalam menciptakan sistem mobilitas perkotaan yang efisien dan berkelanjutan. Pengembangan *Transit Oriented Development* (TOD) menawarkan pendekatan strategis untuk mengoptimalkan investasi transportasi massal sekaligus membentuk struktur kota yang lebih kompak dan berorientasi pada transportasi publik.

Analisis dalam *policy brief* ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi TOD tidak hanya bergantung pada pembangunan pada infrastruktur transportasi, tetapi juga pada pengaturan tata guna lahan, integrasi antarmoda, serta kebijakan pengelolaan permintaan transportasi yang konsisten. Tanpa koordinasi lintas sektor dan dukungan kebijakan yang terintegrasi, pengembangan kawasan berbasis transit berpotensi tidak mencapai tujuan peningkatan penggunaan angkutan umum.

Oleh karena itu, penguatan integrasi antara kebijakan transportasi dan tata ruang perlu menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan perkotaan di Indonesia. Melalui implementasi TOD terencana dan berkelanjutan, pemerintah dapat mendorong pergeseran penggunaan moda transportasi menuju angkutan umum, mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan pribadi, serta meningkatkan kualitas lingkungan dan kehidupan perkotaan secara keseluruhan.

INTEGRASI

BAGI DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT, MASA DEPAN TRANSPORTASI PERKOTAAN DIBANGUN MELALUI SISTEM YANG SALING TERINTEGRASI. KONEKTIVITAS ANTARMODA, TATA RUANG YANG MENDUKUNG, DAN LAYANAN TRANSPORTASI PUBLIK YANG ANDAL MERUPAKAN FONDASI UNTUK MENGHADIRKAN MOBILITAS YANG INKLUSIF, EFISIEN, DAN BERKELANJUTAN.

KARENA PADA AKHIRNYA, KEBERHASILAN SEBUAH SISTEM TRANSPORTASI TIDAK DIUKUR DARI BANYAKNYA INFRASTRUKTUR YANG DIBANGUN, MELAINKAN DARI KEMUDAHAN MASYARAKAT BERPINDAH DARI SATU MODA KE MODA LAINNYA DENGAN AMAN, NYAMAN, DAN TANPA HAMBATAN.

"SETIAP PERPINDAHAN ANTARMODA YANG SEMAKIN MUDAH ADALAH LANGKAH MENUJU KOTA YANG LEBIH EFISIEN. INTEGRASI TRANSPORTASI BUKAN HANYA MENGHUBUNGKAN HALTE, STASIUN, ATAU TERMINAL, TETAPI JUGA MENGHUBUNGKAN MASYARAKAT DENGAN KESEMPATAN, PRODUKTIVITAS, DAN KUALITAS HIDUP YANG LEBIH BAIK."

Di Balik Rompi Oranye

Sebagai bagian dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, para petugas percaya bahwa keselamatan bukan sekadar memenuhi regulasi atau mencapai target pemeriksaan. Keselamatan adalah sebuah amanah.

M

Matahari belum sepenuhnya meninggi ketika Terminal Tipe A Guntur Melati mulai dipenuhi suara mesin bus yang bergantian memasuki area keberangkatan.

Terminal perlahan hidup, menjadi titik awal ribuan perjalanan yang akan dimulai hari itu. Di tengah kesibukan tersebut, sekelompok petugas Direktorat Jenderal Perhubungan Darat telah lebih dulu memulai aktivitasnya. Dengan rompi oranye yang menjadi identitas mereka, *clipboard* di tangan, dan daftar pemeriksaan yang harus dipastikan satu per satu, mereka bergerak menuju bus-bus yang akan segera berangkat.

Mereka memeriksa kondisi ban, memastikan tekanan angin masih sesuai standar. Lampu utama, lampu sein, lampu rem, klakson, *wiper*, hingga pintu darurat diperiksa tanpa terkecuali. Sistem pengereman diuji. Tidak berhenti

di situ, kondisi fisik pengemudi pun menjadi perhatian.

Semua dilakukan dengan satu tujuan yang sama: **memastikan setiap perjalanan dimulai dalam kondisi yang aman.**

Di dalam bus yang sedang diperiksa itu, duduk puluhan orang dengan cerita yang berbeda. Seorang mahasiswa memilih pulang menggunakan bus malam setelah menyelesaikan ujian akhir semester.

Di bangku belakang, seorang ayah memandangi foto anaknya yang baru berulang tahun. Baginya, perjalanan ini adalah perjalanan untuk kembali memeluk keluarga.

Tak jauh dari pintu masuk, seorang perempuan muda memegang map berisi dokumen lamaran kerja. Ia berharap wawancara yang akan dihadapinya menjadi awal dari kehidupan yang lebih baik.

Mungkin mereka tidak saling mengenal. Namun, mereka semua menitipkan semua harapan pada perjalanan yang sama.

Harapan untuk bertemu keluarga. Harapan mendapatkan pekerjaan.

Harapan memperoleh pendidikan. Harapan memperbaiki kehidupan.

Petugas yang mengenakan rompi oranye memahami satu hal: **setiap bus membawa ratusan harapan yang harus dijaga dan keselamatan tidak pernah mengenal kompromi.**

Menunda keberangkatan beberapa puluh menit jauh lebih baik daripada dengan mempertaruhkan keselamatan puluhan nyawa. Di balik ketegasan itu, sesungguhnya ada rasa tanggung jawab yang besar.

Sebagai bagian dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, para petugas percaya bahwa keselamatan bukan sekadar memenuhi regulasi atau mencapai target pemeriksaan. Keselamatan adalah sebuah amanah.

Setiap pemeriksaan yang dilakukan dengan teliti adalah bentuk penghormatan terhadap nilai kehidupan. **Di situlah makna pekerjaan ini.**

Masyarakat jarang mengetahui berapa banyak kendaraan yang diperiksa, berapa banyak potensi risiko yang berhasil dicegah, atau berapa banyak keputusan sulit yang harus diambil demi menjaga keselamatan bersama.

Mereka tidak bekerja untuk menjadi sorotan, melainkan untuk memastikan setiap perjalanan memiliki kesempatan untuk berakhir dengan selamat.

Dan bagi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, keselamatan bukan hanya tentang kendaraan yang memenuhi standar teknis.

Keselamatan adalah tentang seorang anak yang bisa kembali ke pelukan orang tuanya, seorang pekerja yang tiba di rumah setelah mencari nafkah, hingga seorang pedagang yang dapat kembali dengan hasil usahanya.

Karena pada akhirnya, balik setiap perjalanan yang aman, selalu ada dedikasi para petugas berrompi oranye yang bekerja dalam diam, memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk sampai di tujuan dan kembali ke rumah dengan selamat.

Jalan yang Mengajarkan Kepedulian

Suara bel sekolah baru saja berbunyi. Satu per satu siswa berlarian menuju gerbang, sebagian menggandeng tangan orang tuanya, sebagian lagi bercengkerama dengan teman-temannya. Di depan sekolah, kendaraan mulai melambat. Seorang petugas berdiri di dekat *zebra cross*, mengangkat tangan memberi aba-aba agar kendaraan berhenti sejenak.

Beberapa anak kemudian melangkah perlahan. Sebelum menyeberang, mereka mengangkat tangan, menoleh ke kanan dan kiri, lalu berjalan dengan percaya diri menuju seberang jalan.

Bagi sebagian orang, pemandangan itu mungkin terlihat biasa. Namun bagi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, momen sederhana tersebut menyimpan harapan yang jauh lebih besar. Di sanalah budaya keselamatan mulai dibangun, bukan dari aturan yang rumit, melainkan dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten.

Keselamatan lahir dari nilai-nilai yang dikenalkan sejak dini, ketika anak-anak mulai memahami bahwa jalan adalah ruang bersama yang harus dihormati oleh setiap penggunanya.

Melalui berbagai program edukasi keselamatan jalan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat berupaya menghadirkan pembelajaran yang mudah dipahami oleh anak-anak. Mereka diajak mengenal rambu lalu lintas, memahami fungsi *zebra cross*, belajar pentingnya menggunakan helm, hingga mengerti mengapa harus berhenti sebelum menyeberang.

Bagi anak-anak, kegiatan itu terasa seperti bermain.

“Karena pada akhirnya, jalan bukan sekadar jalur yang menghubungkan satu tempat dengan tempat lain. Jalan adalah ruang kehidupan.”

Namun sesungguhnya pada diri mereka sedang tumbuh sebuah kebiasaan yang kelak akan mereka bawa hingga dewasa. Yang menarik, edukasi keselamatan ternyata tidak berhenti ketika bel sekolah berbunyi.

Seorang anak yang baru belajar pentingnya memakai helm akan pulang dan bertanya kepada ayahnya mengapa tali helm belum dikencangkan. Anak yang baru memahami fungsi *zebra cross* akan mengingatkan ibunya agar menyeberang di tempat yang benar. Bahkan, tidak sedikit orang tua yang mulai mengubah kebiasaan berkendara karena merasa sedang diperhatikan oleh anak-anak mereka.

Tanpa disadari, anak-anak menjadi agen perubahan di lingkungan keluarga. Keselamatan yang semula hanya menjadi materi pembelajaran akhirnya berubah menjadi budaya.

Inilah yang diyakini Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebagai salah satu cara paling efektif membangun ekosistem transportasi yang lebih aman. Sebab keselamatan tidak hanya lahir dari pembangunan infrastruktur, penambahan rambu, atau penyusunan regulasi.

Jalan raya mempertemukan begitu banyak orang dengan kepentingan yang berbeda. Ada pengemudi bus yang mengantarkan penumpang antarkota, pengendara sepeda motor yang berangkat bekerja, pejalan kaki yang menuju pasar, pesepeda yang berolahraga di pagi hari, hingga anak-anak yang berjalan menuju sekolah.

Di balik setiap aturan lalu lintas, selalu ada alasan kemanusiaan. Batas kecepatan dibuat agar pengendara memiliki waktu untuk bereaksi. Marka jalan membantu pengguna jalan memahami hak dan kewajibannya. *Zebra cross* dibuat agar pejalan kaki dapat menyeberang dengan aman.

Melalui berbagai program seperti edukasi keselamatan di sekolah, implementasi Zona Selamat Sekolah (ZoSS), kampanye keselamatan, hingga kolaborasi dengan pemerintah daerah, kepolisian, dan berbagai mitra, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat terus berupaya menghadirkan jalan yang lebih aman bagi seluruh lapisan masyarakat.

Setiap perjalanan membawa harapan. Setiap pengguna jalan membawa seseorang yang menunggu kepulangannya di rumah.

Itulah mengapa keselamatan tidak pernah menjadi tanggung jawab satu pihak saja. Keselamatan adalah hasil dari kepedulian yang dibangun bersama, antara pemerintah menyediakan sistem transportasi yang aman, petugas yang menjalankan tugasnya dengan penuh dedikasi, dan masyarakat yang memilih untuk tertib.

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat percaya bahwa budaya keselamatan dimulai dari langkah-langkah kecil. Dari seorang anak yang belajar menyeberang dengan benar, hingga dari setiap pengguna jalan yang memilih untuk saling menghormati.

Karena ketika kepedulian tumbuh di setiap langkah, jalan tidak lagi hanya menjadi tempat untuk bepergian. Jalan menjadi ruang yang menghubungkan harapan, melindungi kehidupan, dan mengantarkan orang pulang dengan selamat.

Setiap pagi, ribuan orang memulai harinya dari halte, terminal, atau pinggir jalan. Mereka datang dengan langkah yang sama, menunggu bus yang sama, tetapi membawa tujuan dan harapan yang berbeda-beda. Di dalam satu bus, ada seorang ayah yang berangkat lebih pagi agar bisa tiba tepat waktu di tempat kerja.

Baginya, perjalanan itu bukan sekadar rutinitas, melainkan bagian dari ikhtiar untuk memenuhi kebutuhan keluarga di rumah. Di kursi lain, seorang mahasiswi membuka kembali catatan kuliahnya sambil menunggu bus tiba di kampus. Ia percaya bahwa setiap perjalanan hari ini adalah investasi untuk masa depan yang lebih baik.

Tak jauh dari mereka, seorang pedagang membawa beberapa kotak dagangan yang akan dijual di pasar. Bahkan, seorang ibu yang menggendong anaknya tengah menuju rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan kesehatan.

Mereka mempunyai satu hal yang sama yaitu percaya bahwa setiap perjalanan adalah langkah untuk memperjuangkan harapan.

Bagi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, angkutan umum bukan hanya sarana yang menghubungkan satu tempat dengan tempat lain. Angkutan umum adalah penghubung mimpi. Moda transportasi yang aman, nyaman, dan terjangkau membuka akses bagi masyarakat untuk bekerja, belajar, membangun usaha, memperoleh layanan kesehatan, hingga mengejar peluang yang dapat mengubah kehidupan mereka.

Karena itu, setiap peningkatan layanan transportasi memiliki makna yang lebih besar daripada sekadar menghadirkan perjalanan yang lancar. Ketika sebuah bus beroperasi dengan baik, ketika tarif tetap terjangkau, ketika perjalanan berlangsung aman dan tepat waktu, sesungguhnya ada ribuan harapan

yang ikut bergerak bersamanya.

Di balik setiap bus yang melaju di jalan, tersimpan begitu banyak cerita. Tentang orang tua yang bekerja demi keluarga, anak muda yang mengejar pendidikan, pelaku UMKM yang berjuang mengembangkan usahanya, hingga mereka yang sedang mencari kesempatan untuk memulai lembaran hidup yang baru.

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat percaya bahwa transportasi yang baik bukan hanya mengantarkan penumpang ke tujuan, tetapi juga membuka jalan menuju kehidupan yang lebih baik. Sebab pada akhirnya, setiap perjalanan bukan hanya tentang jarak yang ditempuh, melainkan tentang harapan yang terus diperjuangkan. Karena itu, menghadirkan layanan transportasi darat yang aman, andal, dan mudah dijangkau bukan hanya tentang membangun sistem mobilitas, tetapi juga tentang memastikan setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk melangkah lebih jauh.

Itulah komitmen yang terus dipegang oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Di balik setiap kebijakan, peningkatan layanan, dan pengawasan yang dilakukan, tersimpan harapan agar setiap perjalanan menjadi awal dari kesempatan baru.

Lebih dari Sekadar Perjalanan

Setiap peningkatan layanan transportasi memiliki makna yang lebih besar daripada sekadar menghadirkan perjalanan yang lancar





DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

KELIHATAN BIASA, TAPI INI BAHAYA!

**Kebiasaan kecil yang sering
disepelekan saat berkendara**

Setiap kebiasaan kecil saat berkendara
dapat berdampak besar pada
keselamatan diri sendiri dan orang lain.
Jadilah pengemudi yang bijak,
dan utamakan keselamatan!

KEBIASAAN KECIL, DAMPAKNYA BESAR

Yuk, berkendara dengan lebih bijak!



**GUNAKAN
SABUK
PENGAMAN**



Keselamatan dimulai
dari hal paling dasar.
Selalu gunakan
sabuk pengaman.



**JANGAN
GUNAKAN HP
SAAT BERKENDARA**



Fokus teralihkan,
risiko kecelakaan
meningkat.



**PATUHI BATAS
KECEPATAN**



Kecepatan tinggi
mengurangi waktu
reaksi, tingkatkan
risiko fatal.



**FOKUS SAAT
BERKENDARA**



Lelah atau kurang fokus
dapat memperlambat
reaksi dan memicu
kecelakaan.



**Utamakan Keselamatan,
Bukan Kecepatan**









Glow With Safety - Spesial Hari Kartini



Rapat Internal Ditjen Hubdat terkait Progres Penanganan Kendaraan ODOL



Narasumber Pada Program Podcast Kemenkoinfra



Jejak di Setiap Perjalanan

- 📷 M. Aulia HMS DJPD
- 📷 Bayu HMS DJPD
- 📷 Bambang HMS DJPD
- 📷 Fachry HMS DJPD
- 📷 Alfian HMS DJPD
- 📷 Rinjani HMS DJPD





Audiensi bersama Walikota Tangerang Selatan



Rapat Internal Terkait Isu Strategis di Lingkungan Dirjen Hubdat



Audiensi Dirjen Hubdat Bersama Menhub dengan Aplikator Online



Sumpah PNS



Pencanangan Zona Integritas di Lingkungan Ditjen Hubdat

The background is a solid dark red color. Overlaid on this are several sets of thin, light red wavy lines that flow across the page, creating a sense of movement and depth. These lines are more concentrated in the middle section where the text is located.

*info***HUBDAT**

Berpikir Jernih Membangun Transportasi Darat



WIM TERINTEGRASI, JALAN LEBIH AMAN, TRANSPORTASI LEBIH TERTIB

Sistem *Weigh In Motion* (WIM) adalah teknologi modern yang memungkinkan pengawasan berat kendaraan dilakukan secara otomatis saat kendaraan melintas tanpa harus berhenti. Inovasi ini mendukung penegakan hukum yang lebih efektif dan menciptakan transportasi yang selamat, aman, dan tertib.



Tantangan Kendaraan ODOL



Kerusakan jalan dan jembatan

Biaya perbaikan meningkat usia jalan menjadi lebih pendek.



Risiko kecelakaan meningkat

Kendaraan lebih muatan lebih sulit untuk dikendalikan.



Keselamatan pengguna jalan terganggu

Kendaraan ODOL mengancam keselamatan semua pengguna jalan.



Solusi: WIM Terintegrasi



Deteksi otomatis tanpa menghentikan kendaraan

Sistem dapat membaca berat kendaraan saat melaju di jalan.



Data akurat keputusan cepat

Petugas menerima data *real-time* untuk tindak lanjut yang lebih efektif.



Penindakan lebih tepat sasaran

Kendaraan yang melanggar batas muatan dapat segera diidentifikasi.

Manfaat WIM Terintegrasi



Jalan Lebih Tahan Lama

Mengurangi kerusakan jalan akibat beban berlebih.



Keselamatan Meningkat

Risiko kecelakaan menurun, perjalanan lebih aman.



Efisien dan Modern

Pengawasan lebih cepat, biaya operasi lebih efisien.



Transportasi Berkelanjutan

Mendukung sistem transportasi yang tertib dan ramah lingkungan.

Bagaimana cara kerja WIM?

1 Kendaraan melintas di area WIM



2 Sensor membaca berat setiap sumbu kendaraan



3 Data dikirim secara otomatis ke sistem pusat



4 Data diverifikasi oleh petugas



5 Kendaraan yang melanggar akan ditindaklanjuti



WIM terintegrasi adalah langkah nyata menuju transportasi yang lebih aman, tertib, dan berkelanjutan



Tahukah Anda?

Satu kendaraan ODOL dapat merusak jalan hingga ribuan kali lebih cepat dibandingkan kendaraan dengan muatan sesuai aturan.



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat



Semua Layanan Transportasi Darat dalam Genggaman

 **MitraDarat**

Aplikasi resmi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
untuk mendukung layanan transportasi yang lebih
transparan, aman, dan terpercaya.



Fitur Unggulan



Lacak
perjalanan
bus secara
real-time



Informasi
layanan
transportasi
terpercaya



Layanan dan
pengaduan
lebih mudah



Mendukung
keselamatan
perjalanan

“

**Praktis, Cepat,
dan Terpercaya**

karena keselamatan
dimulai dari informasi
yang tepat!

”

Unduh Sekarang!



Download on the
App Store



ANDROID APP ON
Google play